

SEJARAH AKADEMI MILITER MAGELANG 1957 – 1979

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Sawab Bero Sudirjo Bawon

NIM : 86 214 070

NIRM : 865027200066

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1991**

Skripsi

Sejarah

Akademi Militer Magelang

1957 - 1979

Oleh :

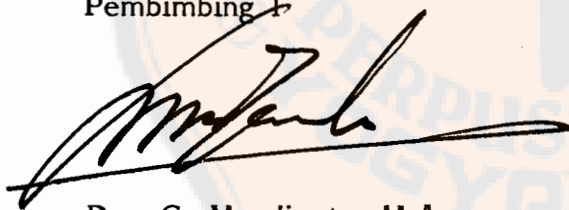
Sawab Bero Sudirjo Bawon

NIM. : 86 214 070

NIRM. : 865027200066

telah disetujui oleh :

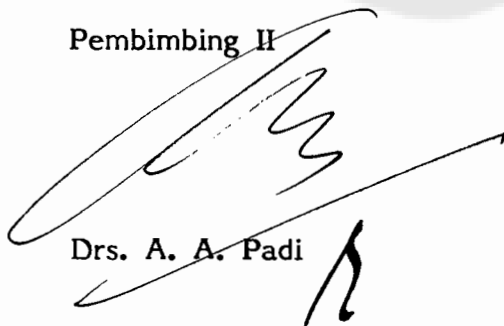
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal : 4/4 - 92

Pembimbing II



Drs. A. A. Padi

Tanggal : 4/4 - 92

SEJARAH
AKADEMI MILITER MAGELANG
1957-1979

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sawab Bero Sudirjo Bawon

NIM : 86 214 070

NIRM : 865027200066

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal ; 27 Nopember 1991
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

Tanda tangan

Ketua Drs. G. Moedjanto, M.A.

Sekretaris Drs. J. Markiswo

Anggota Drs. A.A. Padi

Anggota Drs. J.B.M. Mudjihardjo

Yogyakarta,1991

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

IKIP Sanata Dharma

Dekan



Drs. G. Moedjanto, M.A.

KATA PENGANTAR

Dalam skripsi yang berjudul "Sejarah Akademi Militer Magelang 1957-1979", penulis mencoba mengetengahkan uraian tentang proses perkembangan Akmil Magelang. Di samping itu perlu juga penulis sampaikan hal yang berkaitan erat dengan usaha ABRI pada umumnya maupun Angkatan Darat pada khususnya mempersiapkan diri untuk membentuk kader penentu kebijakan yaitu para perwira di Akmil Magelang. Skripsi ini penulis lakukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta. Kecuali itu tulisan ini sebagai bukti tugas akhir walaupun pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak pernah terselesaikan begitu saja.

Untuk dapat memperoleh data dan sumber, penulis mengadakan studi langsung di Akmil Magelang. Walaupun demikian penulis meyakini bahwa segala sesuatu tidak semudah seperti yang direncanakan, akan tetapi sekecil apapun kemungkinan selalu ada. Oleh karena itu sebagai ucapan syukur pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada: Drs. G. Moedjanto, M.A. selaku Dekan FPIPS sekaligus sebagai pembimbing I; Drs. A.A. Padi, selaku pembimbing II; Drs. Sutarjo Adisusila, J.R. sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah beserta seluruh staf Dosen Pendidikan Sejarah, serta kepada staf Sekretariat FPIPS dan juga semua petugas perpustakaan IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

Selain itu dari Akmil Magelang juga telah memberikan

bantuan yang tidak sedikit kepada penulis, sehingga sudah sepantasnyalah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: Mayjen. Toni Hartono Gubernur Akademi Militer Magelang yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan studi pustaka di Akmil Magelang; Lettu Sahala Manalu, Kasitak Akmil; Bp. Peltu. Moch Syaref Bagpehhumas serta kepada seluruh staf Perpustakaan di ksatrian Akmil Magelang yang dengan sabar membantu bahkan melayani penulis dalam memperoleh data.

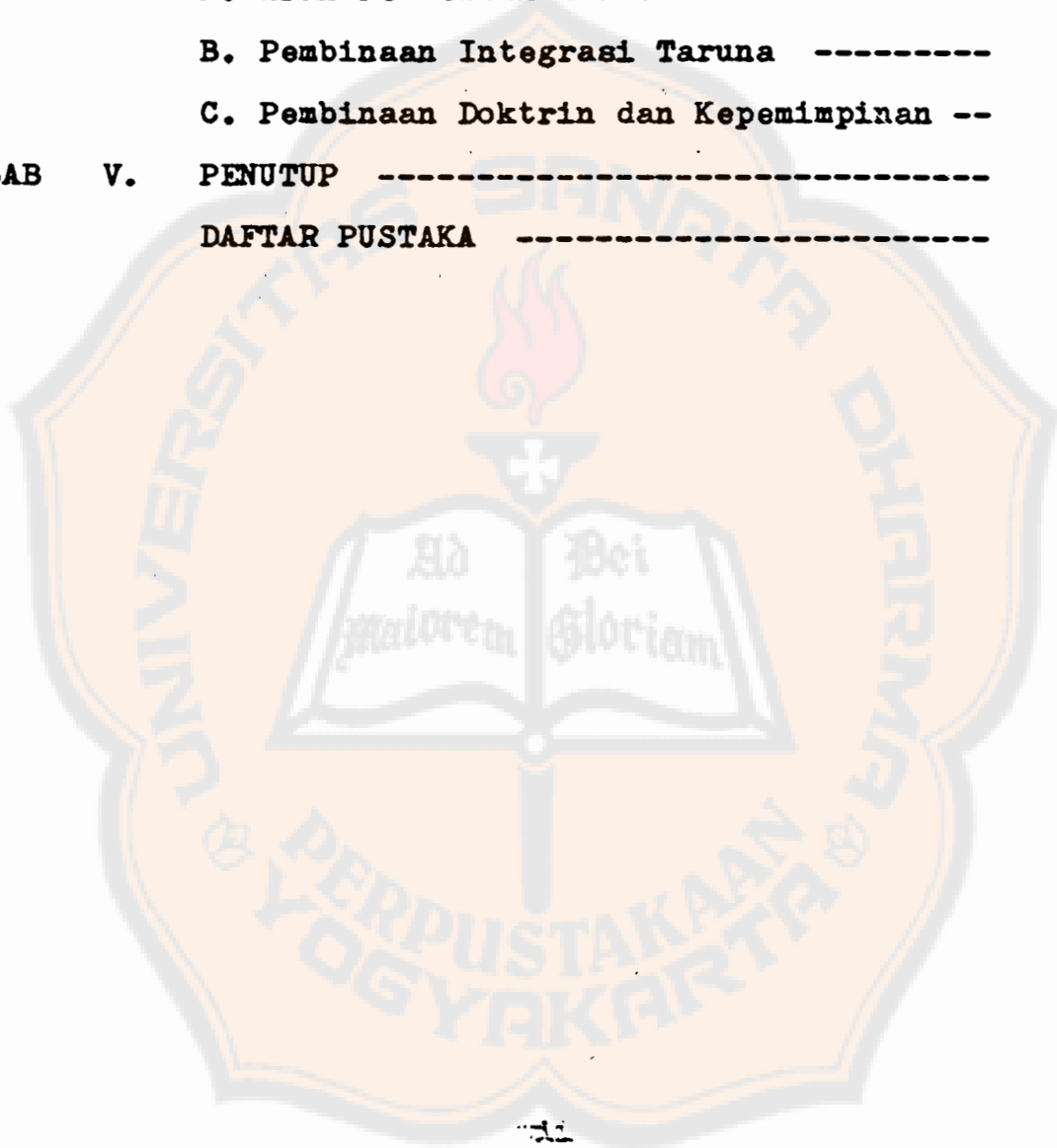
Yang tidak dapat penulis lupakan adalah bantuan dan dorongan dari orang tua serta seluruh saudara baik yang berupa teguran maupun nasihat untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada seluruh sahabat yang bermurah hati kepada kami namun tak mungkin penulis sebutkan satu demi satu. Dengan rasa senang, bangga dan takut penulis mampu merampungkannya dengan tidak sempurna. Oleh karena itu dengan segala sisa keberanian dan kelapangan penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi pembenahan skripsi ini khususnya dan bila mungkin untuk dapat mengayunkan dalam langkah berikutnya.

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
KATA PENGANTAR -----	iv
DAFTAR ISI -----	vi
ABSTRAK -----	viii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penulisan -----	9
D. Metode Penulisan -----	10
E. Manfaat Penelitian -----	11
BAB II. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN AKADEMI MILITER NASIONAL -----	13
A. Akademi Militer Yogyakarta -----	14
B. Perkembangan Akademi Militer Nasional -----	21
1. Pentingnya Pembukaan 'Kembali' AMN -----	21
2. Integrasi AMN dengan Atekad -----	24
3. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia -----	28
BAB III. POLA PEMBENTUKAN PERWIRA TNI-AD DI AKADEMI MILITER NASIONAL. -----	33
A. Tugas Pokok dan Fungsi AMN -----	33
B. Bentuk dan Struktur Organisasi AMN -----	40
1. Struktur Organisasi AMN 1957 -----	42
2. Struktur Organisasi AMN setelah Integrasi dengan Atekad -----	43

	C. Rekrutmen dan Pembinaan Taruna -----	44
	D. Isi dan Pelaksanaan Kurikulum AMN --	50
BAB IV.	PEMBINAAN TARUNA DI AKABRI -----	58
	A. Arah Pembentukan Akabri -----	58
	B. Pembinaan Integrasi Taruna -----	63
	C. Pembinaan Doktrin dan Kepemimpinan --	69
BAB V.	PENUTUP -----	74
	DAFTAR PUSTAKA -----	78



ABSTRAK

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sering dijadikan sebagai katalisator untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan dala pendidikan. Oleh karena itu sangat menarik untuk dikaji, bagaimana peristiwa sejarah tersebut apabila dikaitkan dengan pendidikan, khususnya pendidikan untuk memben-tuk para perwira di lingkungan Angkatan Darat. Lebih khu-sus lagi pendidikah TNI-AD di Akmil Magelang dan juga se-jarah Akademi Militer Magelang dari tahun 1957-1979 (peri-ode AMN hingga Akabri) sebab Akmil merupakan wahana fisik untuk berlangsungnya proses pendidikan.

Untuk dapat melihat keterkaitan antara peristiwa se-jarah dengan pendidikan militer, perlu merumuskan-nya terlebih dahulu ke dalam beberapa permasalahan yaitu: bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Akademi Militer Na-sional terutama menyangkut latar belakang historisnya. Ba-gaimana pola pembentukan perwira TNI-AD di Akademi Militer Nasional? Perlu juga melihat bagaimana proses pembinaan taruna di dalam periode Akademi Angkatan Bersenjata Repu-blik Indonesia.

Dengan memahami permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni da-pat mengetahui bagaimana Sejarah Akademi Militer Magelang dari tahun 1957-1979. Dari periodisasi tersebut di atas dapat ditarik suatu gambaran yang membedakan pola pendi-dikan calon perwira sebelum dan sesudah tahun 1965. Kese-muanya itu akan lebih jelas apabila dapat memahaminya me-lalui uraian dalam bab-bab berikutnya.

Dalam membahas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis lebih banyak menggunakan metode deskriptif, mengingat cara penulisannya lebih banyak mengolah dan me-maparkan data dari berbagai sumber yang kemudian disusun-nya menjadi uraian yang kronologis. Namun demikian penulis mencoba untuk berani mengajukan ulasan-ulasan guna menang

kap dan memahami permasalahan maupun menganalisisnya, sesuai dan setingkat kemampuan penulis.

Dengan demikian dapat disajikan bahasan-bahasan yang runtut mulai dari awal terbentuknya Akademi Militer Yogya sampai dengan berdirinya Akademi Militer Magelang tanpa terlepas dari latar belakang historisnya. Setelah itu akan dibahas seluk beluk walaupun secara dangkal tentang pola pembentukan perwira TNI-AD di Akademi Militer Nasional sebelum diintegrasikan menjadi Akabri, sampai akhirnya memarkannya proses pembinaan taruna pada periode Akabri dari tahun 1965-1979.

Kerangka penulisan seperti tersebut di atas, digunakan untuk lebih memahami proses pembentukan dan penyempurnaan baik segi fisik maupun non fisik Akademi Militer Magelang dari masa ke masa. Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa penyempurnaan pendidikan para taruna sejalan dengan peristiwa dan pengaruh sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama dalam segi perjuangan bersenjata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal yang dapat disumbangkan sejarah adalah pemaparan kondisi kesejarahan atau masa lampau yang membawa pengaruh-pengaruh pada masa kini. Begitu halnya dengan proses perjuangan bangsa Indonesia yang berlangsung sampai sekarang, tidak terlepas dari jerih payah dan penghayatan dari peristiwa-peristiwa yang menempanya di masa silam. Subyektifitas sejarah akan mempunyai fungsi khusus dalam gerak sejarah pada umumnya dan dalam gelora revolusi, sebab sejarah sebagai subyek harus memberikan pengertian kesadaran dan keyakinan tentang gerak sejarah untuk dapat mengikutsertakan manusia dalam gerak sejarahnya.¹

Seperti kemerdekaan yang diperoleh dan dinikmati sampai saat ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia, yang direbutnya dari pemerintah kolonial. Nilai dari kemerdekaan tersebut diperjuangkan untuk dapat mempertahankan kedaulatan guna mendapatkan pengakuan dunia. Setiap perjuangan akan selalu diwarnai oleh tujuan dan cita-cita serta nilai dan peran yang berimplikasi pada hasil yang diperolehnya.

Dalam upaya memperoleh kemerdekaan, perjuangan dia-

¹R. Moh. Ali, Sedjarah dalam Revolusi dan Revolusi dalam Sedjarah (Djakarta: Bhratara, 1965), hal. 14

rahan untuk merebutnya dari penjajah. Pada fase ini, yang banyak memainkan peranan adalah dari golongan sipil yang telah memperoleh pendidikan yang memadai sebagai pemimpin waktu itu. Tugas yang terpenting untuk mendapatkan kemerdekaan dengan menggerakkan masyarakat serta mendidiknya agar menjadi kekuatan dalam perjuangannya mendapatkan kebebasan.² Personel dari generasi tersebut dapat kita lihat dari keberhasilan kepemimpinan dwi tunggal Sukarno-Hatta. Mereka merupakan generasi dari golongan sipil yang tidak mendapatkan pendidikan militer.

Fase berikutnya adalah usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan untuk mempertahankan kemerdekaan yang terwujud dalam perang kemerdekaan. Makna dari pernyataan itu tersit dalam tekad bahwa bangsa kita adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Tokoh yang berperan dalam fase tersebut telah mengalami polarisasi, dengan tampilnya militer, terutama dalam perang kemerdekaan yang mana mereka telah memainkan peran masing-masing. Diplomasi dilakukan oleh pemerintah sipil dengan segala konsekuensinya, sedangkan militer menggunakan kekuatan fisik (dengan perang gerilya), dengan tetap menggunakan kekuatan rakyat sebagai pendukungnya.

Realitas tersebut sebagai bukti bahwa dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, kemudian mempertahankannya terda-

²Istilah tersebut dipakai T.B. Simatupang untuk menggambarkan hubungan Sipil-Militer pada masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, yang berarti mendidik rakyat untuk memperoleh kemerdekaan.

pat dua 'golongan' yakni sipil dan militer. Akan tetapi, keduanya jangan dilihat sebagai hal yang bertentangan, melainkan merupakan satu kekuatan yang menggambarkan kekuatan bangsa Indonesia. 'Muncul dan tenggelamnya' peranan dari tiap-tiap generasi memang sangat dipengaruhi oleh kondisi obyektif bangsanya. Adanya dalil Challenge and response, memberi gambaran bahwa setiap sejarah perjalanannya suatu bangsa mempunyai tantangan dan masalah yang menuntut jawaban yang berbeda-beda. Maka setiap generasi harus siap untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda,³ menurut kondisi dinamis bangsanya.

Dengan berperannya militer dalam perjuangan bangsa, maka selama itu pula TNI-AD memberikan andil dalam bidang pertahanan dan keamanan. Akan tetapi dalam perkembangannya peran di atas meluas juga ke sektor di luar militer yang disebabkan oleh pengalaman sejarahnya. Peran itu tidak dapat terelakkan dari historical legitimacy. Pengabsahan sejarah ini, diperoleh dan diperuntukkan TNI-AD sejak lahirnya dalam kancah revolusi fisik, di mana mereka langsung menerima 'beban' pokok dalam kancah dan langkah penyelamatan negara. Setelah perang kemerdekaan berakhir, tugas tentara beralih ke sektor keamanan dalam negeri baik keamanan intern tentara maupun konflik dalam pemberontakan. Puncak legitimasi untuk TNI-AD diraih setelah peristiwa G 30 S/PKI dengan akibat merosotnya kepemimpinan Sipil dan mun-

³Surono, "Perjalanan Sejarah Bangsa Mempunyai Tantangan Sendiri" dalam, Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 1990.

culnya kekuatan: TNI yang kemudian tampil sebagai penentu utama politik Orde Baru.

Di dalam negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II, pada umumnya terdapat hubungan yang erat antara perkembangan dan kemajuan negara dengan kemerdekaan bangsanya. Kondisi yang demikian mengisyaratkan kemungkinan kepada golongan militer sebagai alat negara untuk lebih berkembang. Logikanya, setiap negara yang baru merdeka masih harus berjuang untuk mempertahankannya. Keadaan dan realitas tersebut mendorong perlunya mengorganisasi alat negara secara mantap. Setelah dengan sendirinya, hubungan tetap berlaku dengan akibat lebih jauh pengaruh militer dalam negara-negara sedang berkembang akan berdampak dalam politik.

Dalam perkembangannya, militer telah berhasil memiliki kekuatan dalam mewujudkan cita-cita sebagai stabilisator, akan tetapi yang diharapkan bukan merupakan stabilisator yang statis. Untuk itu TNI mempunyai keyakinan bahwa tugasnya semakin berkembang ke arah perbaikan nasib dan keadaan hidup bangsanya. Dengan demikian, sekarang kita telah melihat dengan nyata adanya dwifungsi ABRI yang berdampak TNI memiliki kekuatan yang menonjol. Memang TNI telah memiliki power surplus atau kekuasaan yang berlebihan. Akan tetapi TNI tidak akan memanfaatkan kekuasaan sebab ia mempunyai self restraint.⁴

⁴Alfian, "Kita memerlukan Pemimpin yang Intim dengan Masyarakat" dalam, Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia (Jakarta:PT Gramedia, 1978), hal. 299

Dengan tugas memperbaiki nasib bangsanya yang didasari dorongan moral, kesadaran nasional dan patriotisme, militer selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan usaha yang dilakukannya untuk menyempurnakan bidang pendidikan militer. Pembaharuan pendidikan didukung adanya idealisme yang terutama dipertebal oleh kegagalan yang dilakukan oleh pihak non militer baik masalah indoktrinasi maupun kaderisasi. Mereka merasa bertanggung jawab mengemban tugas negara ditopang dengan disiplin hierarkis tinggi sehingga memperlancar proses pembangunan.

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Angkatan Darat meliputi dua bidang pokok.⁵ Pertama, pembinaan militer yang meliputi segala usaha untuk mempertinggi daya guna Angkatan Darat dalam menyelenggarakan hankam. Kedua, pembinaan kegiatan-kegiatan dalam rangka ikut melaksanakan haluan negara dan politik negara oleh Angkatan Darat sebagai golongan fungsional.⁶ Tugas TNI-AD itu sangat bertumpu semangat nasionalisme maupun disiplin yang ketat dan hal ini dapat mereka tunjukkan melalui pendidikan perwira TNI-AD yang sudah dirintis sejak awal kemerdekaan. Dengan pendidikan itu TNI-AD telah membina kader-kader yang dipersiapkan sebagai pimpinan perjuangan. Hanya TNI-AD yang telah membuktikan kemampuannya menetaskan perwira dan elit sosial politik yang akan mempertahankan dan membela Panca-

⁵Ahmad Yani, Tugas dan Amal Angkatan Darat dalam Revolusi Indonesia (ceramah J.M. Panglima AD Letjen. A. Yani di hadapan kader revolusi: Puspen AD). t.t., hal. 8.

⁶Ibid.

sila secara konsekuen dan konsisten.⁷ Di samping itu, pendidikan perwira TNI-AD menanamkan doktrin untuk membina sikap mental yang sangat diperlukan dalam perjuangan mereka sesuai dengan manajemen militer yaitu the man behind the gun.

Pembaharuan yang dilakukan lewat pendidikan menyangkut dua aspek terkait, yaitu pembangunan wadah demi terlaksananya proses belajar dan pembaharuan isi pendidikan, yang dimodifikasikan untuk menghadapi tantangan jamannya. Dengan pendidikan diharapkan terbentuk kader-kader bangsa yang memiliki kepribadian yang mengakar dalam budaya sendiri, agresif, memiliki orientasi ke masa depan yang membuka cakrawala baru dan harapan baru bagi seluruh bangsa,

Berpijak dari uraian di atas, dengan memperhatikan peristiwa sejarah, penulis mendapat inspirasi dengan mengajukan praduga bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya pergerakan kemerdekaan, tentara memiliki peran. Dengan perannya tersebut, maka tentara memperoleh historical legitimacy, yang kemudian ingin dipertahankannya bahkan semakin disempurnakan. Salah satu jalan untuk dapat melakukan itu perlu membentuk kader perwira dengan pendidikan. Dari uraian tersebut, maka dalam skripsi ini penulis memunculkan topik tentang "Sejarah Akademi Militer Magelang 1957-1979". Tinjauan dalam penulisan ini mempertahankan

⁷Christianto Wibisono, "1991: Indonesia Garuda Ketiga wawancara Imajiner dengan Bung Karno", dalam Suara Merdeka 2 Januari 1991

kronologi untuk membantu pemahaman dalam membantu/ membina generasi muda TNI-AD. Kerangka penulisan sejarah lain yang tidak dapat dihindari penulis adalah yang bersifat deskriptif bahkan naratif. Untuk menangkai kecenderungan itu penulis mencoba mengajukan gagasan-gagasan yang sebenarnya, terlalu dangkal untuk disebut analisis.

Alasan penulis memilih topik tersebut adalah: Pertama sejak munculnya dalam perjuangan negara sampai sekarang TNI-AD memiliki kekuatan yang sangat menonjol. Kedua, Kekuatan tersebut merupakan hasil pembentukan perwira TNI-AD Ketiga, bahwa para perwira tersebut banyak dihasilkan dari Akmil Magelang yang sering dimaklumi sebagai generasi Magelang.

Dari ketiga alasan di atas, muncul keinginan penulis untuk melihat dan mendeskripsikan tentang Sejarah Akademi Militer Magelang dari tahun 1957-1979. Mengapa diambil periode tersebut? Alasan yang mendasari: Pertama, Akademi Militer Magelang yang bermula dari Akmil Yogya, resmi didirikan tahun 1957 dengan nama AMN /Akademi Militer Nasional Kedua, dalam periode tersebut terdapat momentum tahun 1965 yang berdampak adanya masa "Orla" dan "Orba". Sedangkan alasan ketiga dengan adanya tonggak tersebut, dalam pola pendidikan di Akmil terdapat perubahan dari AMN yang secara khusus mendidik taruna Angkatan Darat, menjadi AKABRI dengan segala implementasinya hingga tahun 1979 sebelum akhirnya berubah lagi menjadi Akademi Militer Magelang.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang maupun alasan penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengajukan beberapa permasalahan yang akan diusahakan jawabannya.

1. Bagaimana perkembangan Akademi Militer Magelang ?
 - Bagaimana latar belakang historis sehingga diperlukan sebuah Akademi Militer ?
 - Apa tujuan utama pembentukan Akademi Militer ?
 - Bagaimana usaha penyempurnaan lembaga pendidikan Militer ?
2. Bagaimana pola pembentukan taruna di AMN dari tahun 1957-1965 ?
 - Apa tugas pokok dan fungsi utama AMN ?
 - Bagaimana bentuk dan struktur organisasi AMN ?
 - Bagaimana perekrutan dan pembinaan taruna ?
 - Bagaimana isi dan pelaksanaan kurikulumnya ?
3. Bagaimana pembentukan taruna pada masa AKABRI ?
 - Bagaimana arah pembentukan Akabri ?
 - Mengapa perlu integrasi para taruna ?
 - Bagaimana pembinaan doktrin dan kepemimpinan ?

Permasalahan pertama di atas, akan menggali asal mula Akademi Militer Nasional terutama sejak kemerdekaan RI hingga munculnya AMN. Hal itu perlu mengingat keberadaan AMN bermula dari berdirinya Akmil Yogya pada tahun 1945. Kecuali itu penting juga menelaah perkembangan fisiknya.

Permasalahan kedua, menonjolkan periode AMN yaitu dari awal berdirinya tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 ke-

tika berubah fungsi menjadi Akabri. Dengan demikian penulisan ini dimaksudkan agar dapat memahami secara khusus pola pembentukan taruna di AMN sebelum peristiwa G 30 S/PKI, tahun 1965. Jika dikaitkan dengan permasalahan ketiga, di mana nanti akan mengutamakan pembentukan pada masa Akabri dari tahun 1965-1979, akan dapat menemukan perbedaannya. Masalah itu akan memberi tekanan pada aspek integrasi baik secara fisik maupun non fisik dalam pendidikan ABRI khususnya pendidikan para calon perwira di Akabri.

C. Tujuan Penulisan

Skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui arah perkembangan atau sejarah Akademi Militer Magelang. Namun demikian untuk mempermudah perumusan tujuan, secara khusus disuratkan untuk mengetahui perkembangannya sampai tahun 1979 demi pembatasan scope temporalnya. Tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai dengan mendalami latar belakang sejarah sehingga melahirkan akademik militer, tujuan pembentukan serta penyempurnaannya yang akan dipaparkan menjadi satu uraian di dalam Bab II.

Kemudian akan digali gambaran tentang seluk - beluk pembentukan taruna Angkatan Darat selama periode AMN dari tahun 1957-1965, sebelum diintegrasikan menjadi Akabri. Untuk sampai pada tujuan di atas, akan dibahas dalam uraian Bab III. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk memahami pembentukan perwira TNI-AD dalam masa Akabri (1965 - 1979) dengan melihat tujuan pendirian Akabri, pembinaan integra-

si taruna serta pembinaan doktrin dan pembinaan kepemimpinannya yang kesemuanya itu akan menjadi satu uraian dalam Bab IV. Sedangkan di dalam bab berikutnya akan dicoba untuk menarik benang merah tentang perbedaan pembentukan perwira TNI-AD sebelum dan sesudah tahun 1965.

D. Metode Penulisan

Untuk dapat menyajikan data dan fakta dalam bentuk uraian singkat ini, penulis menggunakan metode historik meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa-peristiwa serta gagasan-gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan sejarah. Oleh karena itu dalam prosesnya mencapai final penulisan, dibedakan menjadi dua bagian.

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis mengambil langkah dengan mengadakan observasi langsung ke Akademi Militer Magelang, dengan prioritas utama di Bagsemtak (Bagian Museum dan Perpustakaan). Langkah tersebut diikuti dengan mengadakan interviu baik dengan Kabagsemtak maupun Kasi perpustakaan untuk memperoleh konfirmasi dan kesepakatan dalam mengumpulkan bahan. Setelah didapatkan konfirmasi, penulis mengadakan pengumpulan data yang ada sesuai dengan rencana, kemudian mengklasifikasikannya menurut periodisasi serta mengadakan kritik sumber baik yang berupa dokumen

manuskrip, arsip-arsip, surat-surat keputusan maupun kurikulumnya.

2. Tahap penulisan

Untuk mendeskripsikan data terlebih dahulu dilakukan pemilahan data sesuai dengan permasalahannya, baru kemudian melakukan deskripsi dalam bentuk uraian yang diikuti oleh gambaran-gambaran komparasi sesuai kemampuan penulis dalam menangkap dan menanggapi permasalahan. Sedangkan tahap selanjutnya sebagai langkah akhir dicoba untuk membahas secara kronologis terutama yang menyangkut paparan tentang perkembangan Akademi Militer Nasional.

E. Manfaat Penelitian

Berbagai harapan yang mungkin terlalu tinggi dirasakan penulis terhadap penelitian dalam skripsi ini sangat ditakutkan. Sebab penulisan maupun penelitiannya dirasakan sebagai hal yang sangat simpel. Akan tetapi sebagai harapan penulis yang sangat dangkal, dengan skripsi sederhana ini dapat diambil manfaat di antaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan khususnya sejarah, penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah dunia pengetahuan tentang sejarah Akademi Militer yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
2. Bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan sejarah dapat mengambil hikmah dan teladan untuk membina

ke kesadaran nasional generasi muda peserta didiknya.

3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat mengambil hikmah dan manfaat bahwa pembinaan generasi atau kader sangat perlu untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa, sebab generasi dan proses regenerasi tidak cukup yang bersifat alami saja melainkan perlu adanya kesamaan doktrin dalam perjuangannya.



BAB II

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN AKADEMI MILITER NASIONAL

Negara kita pada waktu proklamasi kemerdekaan 1945, belum memiliki tentara profesional, yang ada barulah rakyat pejuang. Padahal untuk suatu negara yang baru merdeka, adanya tentara sangat mutlak diperlukan. Tidak adanya tentara waktu itu memang disadari oleh para pemimpin bangsa, sebagai suatu alasan politis yang gayut dengan sikap Jepang sebab pemerintah Jepang tidak senang kalau RI membentuk tentara. Bagi Jepang berarti ada kemungkinan perubahan status quo di Indonesia yang tidak diperbolehkan Sekutu.⁸ Setelah satu setengah bulan kemudian, tepatnya 5 Oktober 1945 dengan Keputusan Pemerintah tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), negara kita secara yuridis formal dikatakan mempunyai tentara. Tanggal tersebut kemudian hari lahir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Munculnya Akademi Militer di Indonesia yang pertama tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan Angkatan Perang. Angkatan Perang yang lahir dalam kancah revolusi, dalam bentuknya juga diwarnai olehnya. Itulah yang selalu menjadi kekuatan, bahwa TNI lahir dan berkembang bersama

⁸G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 I: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal, 119

revolusi kemerdekaan, yang berimplikasi juga dengan pendidikan militernya. Angkatan Darat telah memiliki Akademi Militer yang pertama di Yogyakarta pada masa revolusi fisik dengan sebutan Sekolah Kader, sering pula dikatakan sebagai Akademi Militer Yogyakarta, namun demikian, sebutan yang paling populer adalah M.A. Yogya (Militaire Academie Yogyakarta). Dalam tulisan ini akan dipakai istilah Akademi Militer Yogya demi konsistensinya.

A. Akademi Militer Yogyakarta (A.M. Yogya)

Pencetus ide pembentukan Akademi Militer Yogya adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat. Dalam tubuh TNI, pak Oerip dikenal sebagai perintisnya sebab sejak awal berdiri negara RI beliau telah menunjukkan peran yang sangat menonjol. Lahirnya TKR-pun tidak lepas dari gagasan beliau yang disampaikan kepada pemerintah pada awal proklamasi "... aneh suatu negara zonder tentara!"⁹ Lontaran gagasan berupa sindiran yang akhirnya melahirkan TKR, bagi seorang mantan Mayor KNIL (Koninklijk Nederlansch Indisch / tentara India Belanda), bukan merupakan hal yang mengherankan.

Sebagai seorang pejuang yang mengetahui seluk beluk tentang teknis kemiliteran, disadari pula bahwa perlu di-

⁹ Emilia Musin, Diendral Urip Sumoharjo Perintis Angkatan Bersendjata R.I. (Djakarta: Lemsej. Hankam, 1967), hal. 10. Cf., G. Moedjanto, lock cit.

pikirkan dan dipersiapkan prajurit maupun perwira yang terdidik. Untuk mendapatkannya perlu suatu cara dengan pendidikan kader atau sekolah kader. Dari latar belakang pemikiran tersebut, maka Kepala Staf Umum TKR memerintahkan secara lisan kepada Kolonel Samidjo untuk membentuk Sekolah Kader di Yogyakarta pada 27 Oktober 1945. Melihat tenggang waktu dengan pembentukan TKR maka dapat dikatakan waktu persiapannya sangat singkat untuk persiapan pendidikan yang berskala nasional. Akan tetapi bertolak dari kebutuhan, maka usaha tersebut harus segera ditempuh. Kesiapan dan lamanya perencanaan dapat dicermati dari dialog antara Pak Oerip dengan Pak Samidjo "... lalu bagaimana Pak dengan guru-guru (instruktur nya pen.), gedung-gedung dan perlengkapannya ?" Jawab Pak Oerip "Cari Sendiri".¹⁰ Sebagai bawahannya yang terikat oleh hirarkis kepemimpinan militer maka tak ada pilihan lain bagi Kol. Samidjo kecuali segera melaksanakan perintah dengan mewujudkan sebuah Akademi Militer Yogyakarta.

Dalam awal pertumbuhannya yang sejalan dengan pertumbuhan TKR, sudah barang tentu berbeda sekali dengan iklim sekarang. Relevan dengan tuntutan dan keadaan jaman, Akademi Militer Yogya dibentuk dengan modal personel maupun perlengkapan serta tempat yang kurang memadai. Instruktur dan gedung sebagai tempat belajar belum dapat ditentukan

¹⁰Wawancara Moechkardi dengan Kol. Samidjo, dalam, Moechkardi, Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Pisik 1945-1949 (Jakarta: PT Inalju, 1977), hal. 3

kan. Salah satu modal yang mengkondisikan sikap heroik patriotik adalah semangat dan keadaan yang memaksanya untuk segera mendapatkan prajurit yang terdidik dan terlatih untuk memimpin pasukan. Pada akhirnya dapat diperoleh gedung yang saat ini menjadi SMA BOPKRI I Yogyakarta yang bersebelahan dengan lapangan olah raga sebagai tempat latihan.

Untuk menarik minat pemuda memasuki Sekolah Kader, diadakan pengumuman lewat pers dan radio. Dalam pengumuman tersebut salah satu syarat utama sebagai murid adalah laki laki, berbadan sehat, serta mempunyai semangat tinggi dan tekad untuk berjuang yang gigih. Seperti dikutip Moechkardi "Mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh buat menumpahkan jiwa dan raga untuk Indonesia tetap merdeka."¹¹ Sederhananya persyaratan itu membuktikan adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan pemimpin perjuangan yang sangat mendesak. Alasan lain didirikannya Akmil Yogya karena diperkirakan, perjuangan kemerdekaan secara fisik akan berlangsung lama.¹² Di samping itu pendirian Akmil mempunyai segi positif dilihat dari regenerasi, sebab pemimpin TNI waktu itu telah menyadari perlunya kaderisasi tenaga pimpinan TNI sebagai, penerus perjuangan bangsa.

Pembentukan Akmil Yogya pada 31 Oktober 1945 merupa-

¹¹Persyaratan lain terdapat dalam SKH Kedaulatan Rakyat 1 Nopember 1945, dikutip Moechkardi, Ibid. hal. 7

¹²Arsip tentang sejarah Akademi Militer dari Bagsem-tak (Bagian sejarah, museum dan perpustakaan) Akademi Militer Magelang.

kan pelopor pendidikan perwira di Jaman Indonesia merdeka. Setelah itu, di beberapa tempat atas prakarsa para komandan divisi setempat dibentuk pula sekolah-sekolah darurat. Di Tangerang atas prakarsa komandan TKR karesidenan Jakarta dibentuk Akademi Tangerang yang kemudian berhenti setelah terjadi insiden dalam pelucutan senjata tentara Jepang di Lengkong dengan gugurnya instruktur Daan Mogot. Sekolah kadet di Malang yang kemudian diintegrasikan dengan Akmil Yogya, dibentuk atas prakarsa Komandan Divisi VII Surapati. Kecuali itu di Sumatera atas prakarsa Komandan Divisi IV, didirikan pula Sekolah Kadet Berastagi.

Beberapa hari setelah berdirinya Akmil Yogya, pada 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya. Dalam pertempuran itu banyak pemuda yang berhasil merebut senjata lawan namun banyak pula dari mereka yang tidak mengetahui penggunaan senjata mekanik seperti meriam. Oleh karena itu Akmil Yogya mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Gubernur Akmil R. Soewardi, untuk memanfaatkan dan menggunakan senjata meriam.¹³ Insiden tersebut merupakan ujian nyata bagi para taruna Akmil Yogya.

Dalam tahun 1947, dalam menghadapi perang kemerdekaan pertama, para taruna juga diperbantukan kepada Kepala Staf pertempuran di Yogyakarta dengan tugas mempersiapkan perlawanan rakyat menghadapi agresi Belanda. Kecuali itu taruna-taruna disebarkan ke daerah-daerah untuk mengorganisa

¹³Arsip

sikan perjuangan, sedangkan yang di kota-kota ditugaskan untuk memberikan konsolidasi pada sekolah-sekolah menengah untuk melaksanakan praedukasi militer bila sewaktu- waktu mendesak diperlukan.¹⁴

Akmil Yogya juga memiliki sekolah olah raga militer yang lokasinya terpisah dengannya. Sekolah Olah Raga tersebut terkenal dengan istilah SORA, didirikan pada 9 September 1946 di Sarangan. Secara Organisatoris, SORA merupakan bagian dari Akmil Yogya yang segalanya diurus oleh Akmil Yogya. Dokter Singgih sebagai pendiri SORA sebelumnya bekerja sebagai guru di Akmil Yogya. Oleh Gubernur Akmil Yogya ia diperintahkan untuk membentuk Sekolah Olah raga Militer yang harus dibangun di luar Akmil dengan alasan supaya kesa-tuan-kesatuan lain dapat mempergunakannya.¹⁵ Tempat yang dipilih adalah Sarangan di lereng Gunung Lawu. Pemilihan tempat tersebut dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, secara geografis, Sarangan merupakan tempat yang sejuk dan jauh dari keramaian. Kedua, secara geostrategis dipilihnya Sarangan jauh dari medan pertempuran serta terdapat fasilitas untuk belajar, dan asrama. Akan tetapi usia SORA tidak lama karena mengalami kesulitan hubungan dengan 'induknya' terutama komunikasi, dan adanya peristiwa Madiun sehingga SORA ditutup pada tahun 1948.

Dalam perkembangan yang lain, Akmil Yogya pernah di-

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

integrasikan dengan Sekolah Kadet Malang. Sekolah Kadet itu sebenarnya merupakan sekolah darurat yang didirikan atas prakarsa Komandan Divisi Surapati pada bulan Nopember 1945, untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang sangat mendesak dalam menghadapi pertempuran Surabaya. Sekolah Kadet Malang tersebut hanya menerima dua angkatan. Angkatan pertama dibuka tahun 1945 dengan dasar pendidikan SLTP untuk dapat mengikuti pendidikan selama satu tahun. Akan tetapi untuk angkatan kedua, lama pendidikannya ditingkatkan menjadi tiga tahun. Sejak tahun 1947 ketika agresi Belanda I Malang diduduki Belanda sehingga sekolah tersebut berpindah-pindah, sampai akhirnya pada 7 Juni 1948 dipindah ke Solo,¹⁶ Sebelum diintegrasikan dengan Akmil Yogya pada tahun 1948. Pengintegrasian itu sebagai upaya untuk menampung taruna-taruna yang telah dididik serta untuk memperoleh unite de doktrin serta persatuan yang kokoh antara para calon perwira.

Setelah Sekolah Kadet Malang diintegrasikan dan disejajarkan dengan angkatan II Akmil, maka pada bulan September 1949 Akmil Yogya menerima kadet angkatan ke tiga. Adapun syarat untuk mengikuti pendidikan sudah ditingkatkan yaitu harus lulus SMA seperti syarat memasuki akademi umumnya. Namun dalam angkatan III itu jumlah pendaftaranya, jauh di bawah jumlah pendaftar angkatan I. Dari jumlah pendaftar 21 orang, yang lulus seleksi 12 orang, akan tetapi,

¹⁶Moechkardi, op. cit., hal. 27

yang melanjutkan hanya 10 orang.¹⁷ Setelah pendidikan berlangsung selama tiga bulan, 3 orang kadet mengundurkan diri sehingga akhirnya tinggal tujuh orang. Melihat gejala yang demikian serta segala perkembangannya, maka pada tahun 1950 secara resmi Akmil Yogya ditutup walaupun dengan alasan untuk sementara.

Beberapa argumen yang dapat untuk menganalisis alasan penutupan Akmil di antaranya: pertama, secara kuantitatif, jumlah kadet sangat sedikit baik yang mendaftar maupun mereka yang diterima. Di samping syarat harus lulus SMA, yang waktu itu masih sedikit juga karena kondisi dalam masa transisi setelah terjadi gencatan senjata antara tentara kita dengan Belanda yang memberi isyarat bahwa peperangan akan segera berakhir. Situasi semacam itu mengundang asumsi masyarakat seakan-akan negara tidak lagi membutuhkan tentara/perwira. Kedua, untuk meningkatkan kualitas dalam tubuh TNI akan diadakan reorganisasi. Penciutan jumlah perwira dilakukan untuk mengefektifkan karena sudah terlalu banyak perwira yang dihasilkan melalui sekolah-sekolah kader 'darurat' selama revolusi fisik. Peningkatan mutu diupayakan dengan mempersiapkan pendidikan yang akan dilaksanakan setelah penutupan, juga berdasar hasil KMB yang akan mengadakan perluasan baik pendidikan perwira dan bintara serta tingkat tamtama. Sedangkan alasan ketiga dapat dikemukakan bahwa setelah terjadi peperangan selama revolusi fisik banyak korban terutama sektor finansial.

¹⁷Ibid., cf., Arsip

B. Perkembangan Akademi Militer Nasional

Proses pembangunan sebuah Akademi Militer dilakukan menuju ke arah penyempurnaan. Begitu halnya dengan pembangunan AMN yang terjadi setelah ditutupnya Akademi Militer Yogya.

1. Pentingnya Pembukaan 'Kembali' AMN

Reorganisasi militer pasca KMB, dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme militer. Oleh karenanya, pemerintah mengambil langkah pendahuluan dengan menutup Akmil Yogya untuk sementara waktu yang dimaksudkan sebagai persiapan guna mendukung penyempurnaan dalam bidang pendidikan. Dengan harapan akan dapat menghasilkan perwira profesional yang memiliki kekuatan dan kekerasan sehingga mereka dapat menggunakan kekuatan dan pengaruh untuk mempertahankan ketertiban nasional di dalam menghadapi ancaman, baik dalam bentuk subversif maupun peperangan terbuka.¹⁸ Mengapa perlu penyempurnaan pendidikan perwira? Selama itu sampai tahun 1950, pendidikan militer lebih bersifat insidental temporal untuk menutup kekurangan yang mendesak. Setelah tiba masa 'damai' (dengan adanya gencatan senjata kemudian disusul dengan pengakuan kedaulatan), maka dipandang sebagai waktu yang tepat untuk mengadakan pembaharuan bidang pendidikan militer. Hal lain yang menopang untuk

¹⁸ Eric A. Nordlinger, Militer Dalam Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 69

memusatkan perhatian dalam pendidikan militer adalah adanya misi dari Belanda untuk membantu pendidikan militer sesuai persetujuan KMB.

Di samping sifat insidental temporal, pendidikan militert terdahulu menunjukkan skope spasial. Oleh karena itu perlu diambil langkah untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sebuah Akmil yang berorientasi nasional. Sebuah negara merdeka sangat mutlak memerlukan Akademi Militer Nasional. Sebab Akmil bukan saja penting dari segi militer melainkan juga penting bagi kebutuhan nasional. Akmil akan membentuk perwira-perwira yang memiliki konstelasi jasmani rohani sebagai soko guru kekuatan Angkatan Perang dalam mempertahankan negara.

Memperhatikan pentingnya sebuah Akademi Militer Nasional, sebelum terbentuk AMN telah didirikan Sekolah Pendidikan Perwira dan Sekolah Kader sebagai pendidikan persiapan, serta SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat), sebagai pendidikan peningkatan. Upaya tersebut membuktikan usaha kontinu untuk membenarkan statement bahwa Akmil Yogya ditutup untuk sementara. Statement tersebut dipuktikan juga dengan mendirikan P3AD (Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat) di Bandung tahun 1951. Kemudian pada tahun yang sama dibentuk pula SPGAD (Sekolah Pendidikan Genie Angkatan Darat) yang setingkat Akademi yang kemudian berkembang menjadi Atekad (Akademi Teknik Angkatan Darat).

Kelanjutan Akmil Yogya akan direalisasikan sepenuhnya dengan mendirikan sebuah Akademi Militer Nasional. Langkah pertama yang diambil oleh kalangan pemimpin AD adalah mem-

bentuk Panitia Perencana Akademi Militer, yang diketuai oleh Kol. GPH Djatikusumo. Dipilihnya Kol. Djatikusumo sebagai ketua PPAM dapat dipahami dengan melihat bermacam alasan. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer Yogya setelah R. Soewardi. Alasan tersebut menguatkan asumsi bahwa dia telah mengetahui seluk beluk Akmil dengan melihat kekurangan dan kelebihanannya. Di samping itu Djatikusumo merupakan seseorang yang mengalami langsung dua organisasi kemiliteran yang berbeda. Ia agaknya merupakan satu-satunya opsir didikan Belanda yang masuk PETA.¹⁹ Pengalaman tersebut sangat penting untuk mengambil manfaat positif dari masing-masing bentuk organisasi.

Setelah selesai tugasnya, Panitia tersebut dibubarkan kemudian membentuk lagi Staf Persiapan Akademi Militer Nasional pada 9 Oktober 1954 yang diketuai oleh Letkol. A.J. Mokoginta.²⁰ Realisasi yang jelas menunjukkan kelengkapan sebuah organisasi adalah dengan diangkatnya Kolonel Kavalieri S. Soerjosoerarmo sebagai Gubernur Akademi Militer Nasional pada Januari 1956.²¹

Pada akhirnya pembukaan kembali Akademi Militer dapat dilaksanakan pada 11 Nopember 1957 di Magelang, tepatnya di lembah Tidar menempati sebidang tanah yang dahulu milik

¹⁹Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI (terj. oleh Hassan Basari), (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 75

²⁰Kementrian Penerangan, Akademi Militer Nasional .tt. hal. 6-7

²¹Ibid., hal. 9

KNIL. Di samping itu Magelang dipilahi sebagai tempat pendidikan militer karena pada saat itu tenaga pengajar kerja sama dengan UGM Yogyakarta khususnya untuk bidang non militer. Hakikat pembukaan 'kemali' AMN adalah merupakan kelanjutan dari Akmil Yogya. Pernyataan tersebut seperti amanat Presiden Sukarno dalam pembukaan AMN bahwa bahwa Angkatan I AMN merupakan Angkatan IV, (kadet angkatan I, II dan III) dihasilkan dari Akmil Yogya. Kalau pendidikan dahulu orientasinya untuk memenuhi kebutuhan perwira sebagai 'komandan peleton' yang cecap menghadapi revolusi, maka AMN memiliki skope pendidikan yang lebih luas yakni membentuk seorang pemimpin yang berwatak dan yakin akan kebenaran ideologi negara.²² Mereka dipersiapkan untuk dapat menegakkan dan membela falsafah bangsa di samping tugas pokoknya sebagai alat perjuangan.

2. Integrasi AMN dengan Atekad

Dengan dibukanya AMN pada tahun 1957, maka di dalam Angkatan Darat terdapat dua macam lembaga pendidikan setingkat perwira. Pertama adalah SPGAD yang didirikan di Bandung 1 Januari 1951, yang kemudian berkembang menjadi Atekad dan yang kedua AMN Magelang.

AMN merupakan pendidikan perwira yang bertujuan untuk memajukan Angkatan Darat khususnya dan Angkatan Perang u-

²²Pernah penulis sampaikan lewat artikel "33 Tahun Akmil Magelang" dalam, Kedaulatan Rakyat, 12 Nopember 1990, hal. 4

mumnya. Hal itu dilakukan dengan mempersiapkan perwira remaja sebagai pengganti para perwira pendahulu yang harus meninggalkan dinas kemiliteran. Sifat pendidikan dalam AMN adalah umum, dalam arti mata pelajaran maupun orientasinya. Sehingga para tarunanyapun berasal dari sekolah umum (SMPB dan SMA-B) serta ada yang dari Angkatan Darat bukan perwira, yang memenuhi syarat-syarat kecuali umur yang dapat lebih tua daripada syarat-syarat dari taruna luar AD. Dengan demikian maka penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui dua tahap, yakni pendidikan pendahuluan bagi lulusan SMP-B dan pendidikan umum perwira bagi lulusan tahap pertama, lulusan SMA-B dan dari anggota Angkatan Darat yang memenuhi syarat.

Sedangkan Sekolah Perwira Genie AD (SPGAD) yang didirikan berdasarkan SK KSAD No. 2/KSAD/Kpts/51 sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi kalangan Angkatan Darat khususnya dalam kecabangan zeni. Sebab korps kesenjataan zeni sebenarnya sudah ada sejak 1945, akan tetapi tidak dapat mengembangkan dan menghasilkan perwira zeni yang sesuai atau yang profesional, sehingga timbul kesan bahwa AD hanya memiliki satu korps invanteri saja. Setelah 'aksi polisional' Belanda II serta adanya konsolidasi AD maka, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan unsur pimpinan bidang zeni diperlukan lembaga pendidikan zeni, yang direalisasikan dengan mendirikan SPGAD.

Para taruna SPGAD pada awalnya diambilkan dari Angkatan Darat sendiri. Mereka dididik selama dua tahun sehingga dianggap sederajat dengan lulusan STM dalam penguasaan



saan teknik. Namun demikian sejalan dengan usaha-usaha penyempurnaan, maka setelah berlangsung selama dua tahun, korps zeni merasa perlu membentuk perwira-perwira baru sehingga lama pendidikannya ditingkatkan menjadi 4 tahun.²³ Setelah penyempurnaan itu, para taruna yang diambil dari luar AD yaitu dari SMA-B dan STM. Penyempurnaan jenjang ke pendidikan selama 4 tahun tersebut dapat disejajarkan dengan akademi pada umumnya. Oleh karena itu pada 16 Mei 1956 KSAD mengeluarkan SK No. Kpts 38/5/56 yang isinya mengubah SPGAD menjadi Akademi Genie Angkatan Darat, Perubahan selanjutnya terjadi pada bulan Nopember 1956 menjadi Akademi Zeni Angkatan Darat.²⁴

Adanya dua macam pendidikan perwira Angkatan Darat itu hingga tahun 1959 masih berlangsung, padahal dinas-dinas peralatan dan perhubungan kekurangan tenaga terampil, yang tidak dapat dihasilkan oleh kedua akademi. Untuk mengatasi kekurangan tenaga tersebut perlu dibentuk jurusan kecabangan dalam pendidikan. Kemudian dibentuk jurusan zeni, peralatan dan perhubungan. Ketiga jurusan tersebut tidak mungkin berada di bawah sebuah akademi yang spesifik, khusus menangani zeni. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah Akademi Teknik yang menangani ketiga jurusan di atas. Akhirnya usaha penyempurnaan berhasil dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1960 dengan terbentuknya Atekad.

²³Dokumen Atekad, Menjambut Pembukaan Akademi Teknik Angkatan Darat, 1960, hal. 9

²⁴Ibid.

Sesudah terbentuk Atekad, maka langkah-langkah integrasi mulai dilakukan. Langkah pertama yang ditempuh ialah menggabungkan pendidikan dasar kemiliteran antara Atekad dengan AMN yang dilakukan di Magelang. Kedua, bulan Desember diadakan pelantikan bersama Perwira lulusan Akmil jurusan Teknik dengan Akmil Magelang. Ketiga, pada 1961 pendidikan tingkat I selama satu tahun diadakan di Akmil Magelang, setelah itu untuk tingkat selanjutnya para taruna Akmil jurtek melanjutkan di Bandung. Keempat, pada 1962 diadakan pembaharuan kurikulum, dan akhirnya pada 1964 telah berhasil disatukan secara fisik maupun organisasi dengan menyatukan seluruh taruna di kompleks AMN Magelang.²⁵

Secara makro, alasan pengintegrasian tersebut merupakan langkah antisipatoris para pemimpin TNI yang menyadari bahwa dalam tubuh TNI terdapat dua macam pendidikan perwira. Keadaan semacam ini sangat riskan bagi para calon perwira dari masing-masing jurusan apabila terjadi kompetisi yang kurang sehat. Alasan lain secara finansial, untuk mengefisienkan biaya maupun manajemennya. Hal lain yang lebih penting adalah untuk membina semangat korps perwira AD.

Alasan terakhir di atas yang kemungkinan besar menjadi pertimbangan Angkatan Bersenjata untuk mengintegrasikan masing-masing Angkatan dan Polri. Diyakini oleh para pimpinan TNI bahwa untuk membina persatuan perwira dapat diupayakan juga dalam bidang pendidikan, walaupun matryanya

²⁵Ibid., cf., Arsip

jelas berbeda. Oleh karena itulah maka AMN mengalami penyempurnaan menjadi wadah penyatuan sebagai Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

3. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Sebelum diintegrasikan ke dalam Akabri, masing-masing Angkatan dan Kepolisian telah memiliki suatu akademi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perwira, Angkatan Darat telah memiliki AMN di Magelang dengan segala perkembangannya, Angkatan Laut mempunyai Akademi Angkatan Laut di Surabaya setelah melalui persiapan dan penyempurnaan, mulai dari SAL (Sekolah Angkatan Laut) di Pasiran serta Kursus Ulangan dan Tambahan Tingkat Perwira (KUTP). Begitu juga dengan Angkatan Udara telah ada AAU di Yogyakarta setelah mengalami penyatuan dengan SPL (Sekolah Penerbangan Lanjutan) yang didirikan di Kalijati. Sedangkan Kepolisian awal mulanya mendirikan Akpol di Yogyakarta yang kemudian pindah ke Jakarta dengan nama PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), kemudian dipusatkan di Sukabumi dengan nama SPN (Sekolah Polisi Negara), akhirnya pada tahun 1980 dipindahkan di Semarang sampai saat ini.²⁶

Masing-masing Akademi Angkatan dan Kepolisian pada masa itu menempuh 'sejarahnya' sendiri-sendiri dan kurang koordinasi dengan lainnya. Berpangkal tolak juga dengan

²⁶ Mabes ABRI Pusejtra ABRI, 40 Tahun ABRI I: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal dan Masa Integrasi 1945-1965 (Jakarta: 1985), hal. 128

situasi politik pada awal tahun 1960-an yang diwarnai oleh pergolakan-pergolakan sipil-militer maupun dalam tubuh AD yang memuncak dengan adanya pembangkangan daerah terhadap pusat yang didukung oleh oleh para perwira yang ada di daerah sehingga menimbulkan divergensi. Divergensi memuncak setelah partai-partai politik yang saling bertentangan mau memasukkan pengaruhnya ke dalam masing-masing Angkatan dan Polri. Dalam situasi yang demikian, tentara sering dikatakan sebagai korban untuk selalu berperang mengikuti kemauan sipil yaitu Presiden dan partai politik terutama PKI.²⁷ Konsekuensi dari kondisi demikian membuka peluang untuk dapat mengadakan pembenahan dengan integrasi. Konsep integrasi sendiri memang merupakan suatu yang umum, khususnya di negara berkembang bahkan dikatakan sebagai isu nasional di Indonesia. Integrasi dengan cakupan nasional sulit diwujudkan oleh berbagai organisasi saat itu kecuali TNI. Seperti amanat Pangsar Soedirman bahwa "TNI sifatnya nasional, jarang ada organisasi lain yang sifatnya tegas kenasionalannya."²⁸ Tokoh TNI yang mencermati dan mencetuskan ide untuk mengatasi masalah divergensi dan untuk membina keutuhannya adalah jenderal TNI Gatot Subroto. Sebagai seorang pejuang patriot dan perwira TNI Angkatan 45, beliau melihat timbulnya divergensi sebagai akibat dari pengaruh pergolakan

²⁷ Todiruan Dydo, Pergolakan Politik Tentara : Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1990), hal. 65

²⁸ Sayidiman S., Langkah-langkah Perjuangan Kita (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 69

politik dan perkembangan ketatanegaraan waktu itu.²⁹ Keadaan semacam itu dilihatnya sebagai hal yang membahayakan, baik secara intern dalam tubuh ABRI maupun juga bila dilihat dari kepentingan sebagai alat pertahanan negara. Oleh karena itu perlu dibina kekompakan dalam tubuh ABRI untuk menjamin kekuatan dengan jalan mengadakan penyatuan ideologi maupun penyatuan secara fisik. Salah satu jalan yang dapat ditempuhnya adalah melalui bidang pendidikan.

Langkah pertama yang diambil adalah dengan membentuk kepanitiaan interdepartemental Akademi-akademi yang diketuai Deputi I KASAB Laksamana Muda O.B. Syaaf. Akan tetapi kepanitiaan ini pernah terhenti sebentar karena meletusnya pemberontakan PKI. Kemudian dilanjutkan kepanitiaan A.Gani sebagai ketuanya untuk menyempurnakan rencana panitia terdahulu, sebelum akhirnya dengan SK Presiden/Pangti ABRI No 185/KOTI/1965 tanggal 10-Desember 1965 secara formal didirikan Akabri sebagai pengintegrasian penuh dari AMN, AAU, AAL, dan AAK yang dilakukan tanpa menghilangkan sifat-sifat khas masing-masing Angkatan.³⁰ Setelah itu bersamaan dengan hari ABRI 1966 dibentuk Maskas Komando Akabri dan sebagai Badan Pelaksana Pusat dalam Departemen Pertahanan Keamanan dengan Danjen. Laksamana Muda TNI Rachmat Soemengkar.

Sejalan dengan pembenahan-pembenahan teknis operasio-

²⁹Dephankam Akabri, AKABRI Membentuk Calon Perwira Patriot, Perjuang : Tanggon, Tanggap, Trengginas (1973) hal 3

³⁰Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1967 hal. 9-10

nal, maka pembukaan tahun akademik Akabri Tingkat I atau Akabri Bagian Umum, baru dilaksanakan pada 29 Januari '67. Dipilihnya tanggal tersebut merupakan momentum dalam sejarah perjuangan bangsa, sebab tanggal tersebut berkaitan dengan wafatnya Pangsar Soedirman. Inilah yang merupakan bukti bahwa sejarah telah memberikan andil dalam menanamkan semangat heroik patriotik, di samping harapan tumbuhnya generasi baru seperti ungkapan "Mati satu tumbuh seribu". Akabri Bagian Umum tersebut bernaung dalam satu atap Akabri Bagian Darat dengan nama Akabri Udarat, sedangkan, lainnya menjadi Akabri Bagian Laut, Udara dan Kepolisian.

Dengan adanya Akabri Bagian Umum, generasi-generasi muda TNI tidak hanya mengalami integrasi fisik dari keempat Akademi melainkan lebih dalam dari itu mereka ditanamkan rasa persaudaraan, kedekatan perasaan saling bersatu, saling menghargai dan juga saling membutuhkan. Kalau para perwira didikan Akabri itu dapat mewujudkannya, maka akan mudah untuk membina keempat Angkatan menjadi satu korps yang solid karena mereka akan menjadi pemimpin yang akan diikuti oleh anak buahnya/bawahannya. Melalui pendidikan pengintegrasian, para taruna dididik dengan tujuan mengubah mental non militer menjadi mental militer, meletakkan dasar ilmu kemiliteran dan non militer yang diperkukan tiap-tiap Akabri Bagian serta menggembleng fisik sebagai persiapan pendidikan lanjutan. Di samping itu usaha untuk mempertahankan keutuhan adalah dengan menanamkan rasa kesatuan dan persatuan di dalam lingkungan ABRI serta menanamkan kesadaran mutlak perlunya integrasi.

Edukasi yang dijanjikan wahana untuk membina integrasi, sesuai bagi generasi muda TNI dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Sebab dengan pendidikan akan membentuk kesadaran nasional yang dengan kritis mencari seberapa jauh perbedaan dari masing-masing generasi. Dengan begitu syarat untuk berintegrasi akan mudah dikonkritkan. Dengan pendidikan pula generasi muda akan dapat melihat dan menemukan beberapa perbedaan seperti lapisan sosial, ekonomi, mental maupun budaya dengan rasional berdasar pada interaksi komunikatif yang manusiawi. Oleh karenanya Akabri akan membentuk satu kebulatan kualitas dengan konsep insan lengkap (the whole man concept), dengan triad kualitas yaitu: tanggon dapat diandalkan, tanggap cerdas dan mempunyai daya kritis dalam memecahkan persoalan dan trengginas tangkas dalam berpikir dan bertindak. Itu semua merupakan realisasi dari kesatuan jasmani dan rohani sebagai manusia utuh yang akan mempertahankan kekuatan negara.

Setelah mengetahui perkembangan Akademi Militer Nasional dari awal pertumbuhannya sampai dengan awal Orde Baru, perlu pula diketahui bagaimana praktik pelaksanaannya dalam masing-masing periode. Untuk itu pula secara singkat akan dibahas tentang pola pembentukan perwira TNI-AD di AMN pada Bab III.

BAB III

POLA PEMBENTUKAN PERWIRA TNI-AD DI AKADEMI MILITER NASIONAL

Akademi Militer Nasional Magelang yang didirikan tahun 1957, memiliki arah yang sangat jelas untuk membentuk generasi muda yang bersedia dan memenuhi syarat menjadikan dirinya sebagai prajurit terutama calon perwira. Pembentukan tersebut dapat dipahami sebagai suatu proses terkait, antar berbagai hal. Untuk dapat lebih memahami pola pembentukan penulis mencoba memulai dengan membahas tugas pokok dan fungsi AMN, bentuk dan struktur organisasi AMN, kemudian juga membahas bagaimana AMN merekrut para taruna dan yang terakhir mencoba menelaah isi dan pelaksanaan kurikulumnya seperti paparan berikut.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Akademi Militer Nasional

Kekuatan dalam upaya pertahanan negara, merupakan syarat mutlak untuk dapat menegakkan kedaulatan negara. Oleh karena itu, dalam penyusunan pertahanan negara harus dikerahkan semua sumber kekuatan yang ada, baik kekuatan politik, ekonomi serta kekuatan sosial budaya bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata. Pengerahan dalam penyusunan kekuatan, porsi utama terletak pada kekuatan manusia, yang berimplikasi pada penyusunan hak dan kewajiban warga negara dalam bentuk pembelaan negara. ABRI sebagai kekuatan inti dengan manusia sebagai unsur pokok, mengindikasikan

bahwa negara ha rus memiliki tentara yang kuat untuk menghadapi 'perang'.

Perang bagi bangsa Indonesia memang dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian yang akan dilakukan jika terpaksa. Pandangan di atas konsisten dengan paham yang dianut yaitu bangsa yang cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan, sehingga sedapat mungkin mencegah perang. Dengan paham yang demikian, maka dalam rangkapembelaan negara memuat konsekuensi bahwa tentara yang kuat harus siap pula untuk menghadapi dua situasi perang dan damai. Dalam situasi perang, tentara berperan sebagai pemimpin, sedangkan dalam kondisi damai tentara berfungsi sebagai 'stabilisator' dan 'dinamisator'. Kondisi tersebut memberi peluang kepada masing-masing Angkatan dan Pokri untuk mengaktualisasikan tugasnya sesuai dengan matra masing-masing.

Matra Darat sebagai bagian wilayah RI, harus dipertahankan oleh Angkatan Darat sebagai kekuatan intinya. Oleh karena itu, TNI-AD dalam rangka hankamnas mendapat tugas pokok menyelenggarakan pertahanan darat nasional untuk melindungi kepentingan RI. Tugas pokok tersebut mengandung konsekuensi logis bagi Angkatan Darat untuk melaksanakan pembinaan TNI-AD dan pembinaan pertahanan darat nasional. Pembinaan TNI-AD menyangkut segala usaha untuk mempertinggi efektifitas AD dalam rangka menyelenggarakan hankam. Kemudian diarahkan untuk mengadakan pembinaan hanratnas guna mengarahkan potensi nasional sebagai wahana pertahanan

Darat.³¹ Tugas pokok TNI-AD tersebut masih didukung oleh bebbagai tugas lain yang berfungsi sebagai pengomando dan pengendalian, pembentukan dan pendidikan, pertempuran, administrasi, penelitian dan pengembangan, pembinaan wilayah dan juga berfungsi untuk melaksanakan kewajiban internasional.³²

Dalam manajemen militer umumnya, khususnya Angkatan Darat sumber utama kekuatan militer ada pada manusia, sebab manusialah yang menentukan bukan senjata. Konsepsi ini yang merupakan hakikat dari the man behind the gun. Lebih spesifik lagi para perwira sebagai pucuk pimpinan yang akan menentukan policy bagi korps TNI-AD. Dalam porsi demikian, TNI-AD melakukan pembinaan dengan pembentukan dan pendidikan perwira yang difokuskan di AMN. Dengan demikian menjadi tugas pokok AMN untuk menyiapkan kader-kader perwira melalui pendidikan dan latihan.³³ Hal ini terkait erat, dengan jenjang karier TNI-AD yang memungkinkan para perwira lulusan AMN dapat menjangkaunya karena profesionalitas mereka dibandingkan dengan para perwira yang lain. Kader tersebut dipersiapkan untuk dapat meneruskan proses regenerasi yang bukan saja akan mewarisi nilai-nilai lama, melainkan dapat mengadakan koreksi dan pembaharuan terhadap nilai-nilai yang masih relevan.

³¹Bakri Syahid, Pertahanan Keamanan Nasional (Yogyakarta: Bagus Arafah, 1976), hal. 14

³²Ibid.

³³Mabes AD Dit. Adjen., Buku Petundjuk Tialon Taruna Taruna Muda Akademi Militer Nasional, 1958, hal. 11

Dengan tugas pokok membentuk perwira jabatan pada lingkungan AD, maka AMN mempunyai peran ganda baik sebagai perguruan tinggi maupun sebagai pendidikan tinggi militer. Sebagai pendidikan tinggi, para taruna dengan segala komponennya dipandang sebagai alat perjuangan bangsa yang sekaligus sebagai alat pencerdas bangsa.³⁴ Realisasi dari perannya sebagai alat perjuangan bangsa maupun sebagai alat pencerdas bangsa dan juga untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, AMN menyelenggarakan fungsi: membentuk kesadaran nasional sebagai warga negara; melaksanakan pendidikan ilmiah seperti perguruan tinggi umumnya; membentuk sifat-sifat kepemimpinan dan memberi dasar pendidikan militer.³⁵

Pembentukan kesadaran nasional merupakan salah satu modal utama pertahanan negara, yang pada hakikatnya perjuangan membela kepentingan-kepentingan negara yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan negara. Untuk itu mutlak perlunya pemahaman yang proporsional dalam menghayati nilai dan norma perjuangan bangsa yang membentuk identitasnya. Alasannya adalah bahwa pembentukan kesadaran nasional untuk mengarahkan warga negara yang dapat 'mengabdikan' pada bangsa dan negara sebaik-baiknya. Para perwira, sebagai warga negara yang dengan sukarela masuk sebagai TNI logi-

³⁴T. Jacob, "Perguruan Tinggi sebagai Sumber Kader Bangsa" dalam Madiri Thamrin Sianipar (peny.), Pendidikan Politik Bangsa (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 218

³⁵Mabas AD Dit. Adjen., loc. cit.

ka nya telah memiliki keadaran yang mendasar guna mengabdikan kepada negara dengan menjadi alat negara. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa tidak seluruh hasratnya tercurah demi kepentingan negara, sebab masih banyak faktor yang turut menentukan sehingga pengarahannya tetap diperlukan. Fenomena tersebut merupakan sisi lain yang masih harus dibina untuk melangsungkan kehidupan bangsa.

Fungsi kedua sebagai sebuah akademi, AMN juga menyelenggarakan pendidikan ilmiah selaras dengan konsepsi sebagai alat pencerdas bangsa. Dengan begitu diharapkan para perwira memperoleh pengetahuan luas sehingga mampu menghayati peranan angkatan perang dalam masyarakat dan juga supaya memperoleh pengetahuan umum setingkat dengan lulusan perguruan tinggi lain.³⁶ Pendidikan ilmiah itu dimaksudkan untuk mengembangkan daya nalar sehingga dapat dipakai untuk mengerti diri sendiri atau sering disebut sebagai otoidentifikasi.³⁷ Kalau itu pendidikan militer Angkatan Darat, tentu harus tahu dan dapat mengerti kedudukan dan peran AD dalam Angkatan Perang. Akan tetapi tidak cukup hanya sampai dengan otoidentifikasi saja melainkan harus ada realisasinya yakni dengan mengembangkannya menjadi otoaktifitas.

Otoaktifitas dari taruna AMN, sebenarnya tidak jauh

³⁶Ibid., lihat juga Madiri Thamrin, op. cit., hal. 40

³⁷Soedjono Hoemardani, "Pangkal Tolak bagi Peranan Kader Bangsa" dalam Madiri Thamrin Sianipar, op. cit., hal. 41

berbeda dengan para mahasiswa dalam perannya sebagai agent of change yang seharusnya sekaligus sebagai agent of development. Oleh karena AMN merupakan lembaga pendidikan tinggi AD yang menghasilkan perwira jabatan yang akan menentukan perkembangan AD maka sudah barang tentu mereka dipersiapkan untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan khususnya yang menyangkut masalah kenegaraan. Dari para perwira lah yang harus tahu bagaimana kebijakan yang akan dipakai untuk mengantisipasi perubahan jaman.

Penyelenggaraan pembentukan kepemimpinan yang berimplikasi sebagai pejabat pimpinan militer dan pemimpin rakyat dalam waktu perang, juga dilakukan oleh AMN. Berperan sebagai pemimpin perang atau pemimpin militer dengan hirarki yang ketat, maka mulai dari komandan regu hingga komandan batalyon kepemimpinan merupakan unsur menentukan dalam operasionalnya. Mengapa kepemimpinan dibentuk dalam diri calon perwira? Dalam jenjang kepangkatan perwira merupakan pemimpin yang dapat membawa kesatuannya dimana dalam penentuannya akan diwarnai oleh senioritas dan juga prestasi.³⁸ Senioritas dengan sendirinya melekat pada dirinya berdasarkan strata kepangkatan, sedangkan prestasi menuntut para perwira untuk dapat menunjukkan reputasinya. Oleh karena itu prioritas utama dalam membentuk kepemimpinan harus pada prestasi baru kemudian faktor senioritas, kondisi itulah yang diharapkan dapat menumbuhkan demokrasi

³⁸Dephankam Akabri Udarat, Diktat Kepemimpinan Militer (terbatas) 1969, hal. 6

dalam kepemimpinan militer.

Hal yang perlu dikembangkan dalam kepemimpinan antara lain adalah keluhuran watak. Pendidikan bertugas mengembangkan potensi individu semaksimal mungkin sehingga terbentuk manusia yang berwatak, berotak dan berketrampilan. Dengan semikian pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan.³⁹ Di samping diperlukan pembentukan watak perlu juga tanggung jawab dan kesetiaan baik secara vertikal maupun secara horisontal yang didukung oleh disiplin serta konstelasi jasmani.

Fungsi lain yang diselenggarakan AMN adalah menyelenggarakan pendidikan militer baik umum maupun khusus. Pendidikan militer umum berorientasi memberikan dasar-dasar kemiliteran yang universal dialami oleh berbagai negara menyangkut pemahaman tentang perang baik klasik maupun modern dalam mengarahkan warga AMN untuk dapat mengaktualisasikan perannya sebagai Angkatan Perang.⁴⁰ Mereka merupakan pengendali dalam perang sehingga harus dapat merencanakannya taktik, organisasi dan strategi perang bila kondisi tersebut memaksa untuk dilakukan. Sedangkan pendidikan militer khusus gayut dengan permasalahan intern Angkatan Darat, sehingga perlu juga dilihat struktur organisasi, pembinaan taruna serta kurikulumnya.

³⁹Slamet Santosa, Pembinaan Mental Tugas Utama Pendidikan (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hal. iii

⁴⁰Mabes AD Dit. Adjen., loc. cit.

B. Bentuk dan Struktur Organisasi Akademi Militer Nasional

Akademi Militer Nasional sebagai suatu lembaga pendidikan militer mempunyai bentuk organisasi yang khas dengan suatu Komando Utama Angkatan Darat. Organisasi seperti di atas berdasarkan struktur garis dan staf. Pemimpinnya dipegang oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Mereka bersama Dewan Akademi dan SPRI (Staf Pribadi) menjabat dalam eselon pimpinan.

Untuk memperlancar pelaksanaannya, maka dibentuklah biro-biro seperti biro Pengajaran; Biro Penelitian dan Pengembangan serta Biro Personalia dan Logistik dengan kekhususan dalam bidang masing-masing. Pada prinsipnya Biro-biro tersebut membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan bantuan administrasi pada sekretariat. Kesemua urutan proses tersebut akhirnya sampai pada praktek / operasionalnya yaitu mendidik dan melatih taruna dan taruna muda.

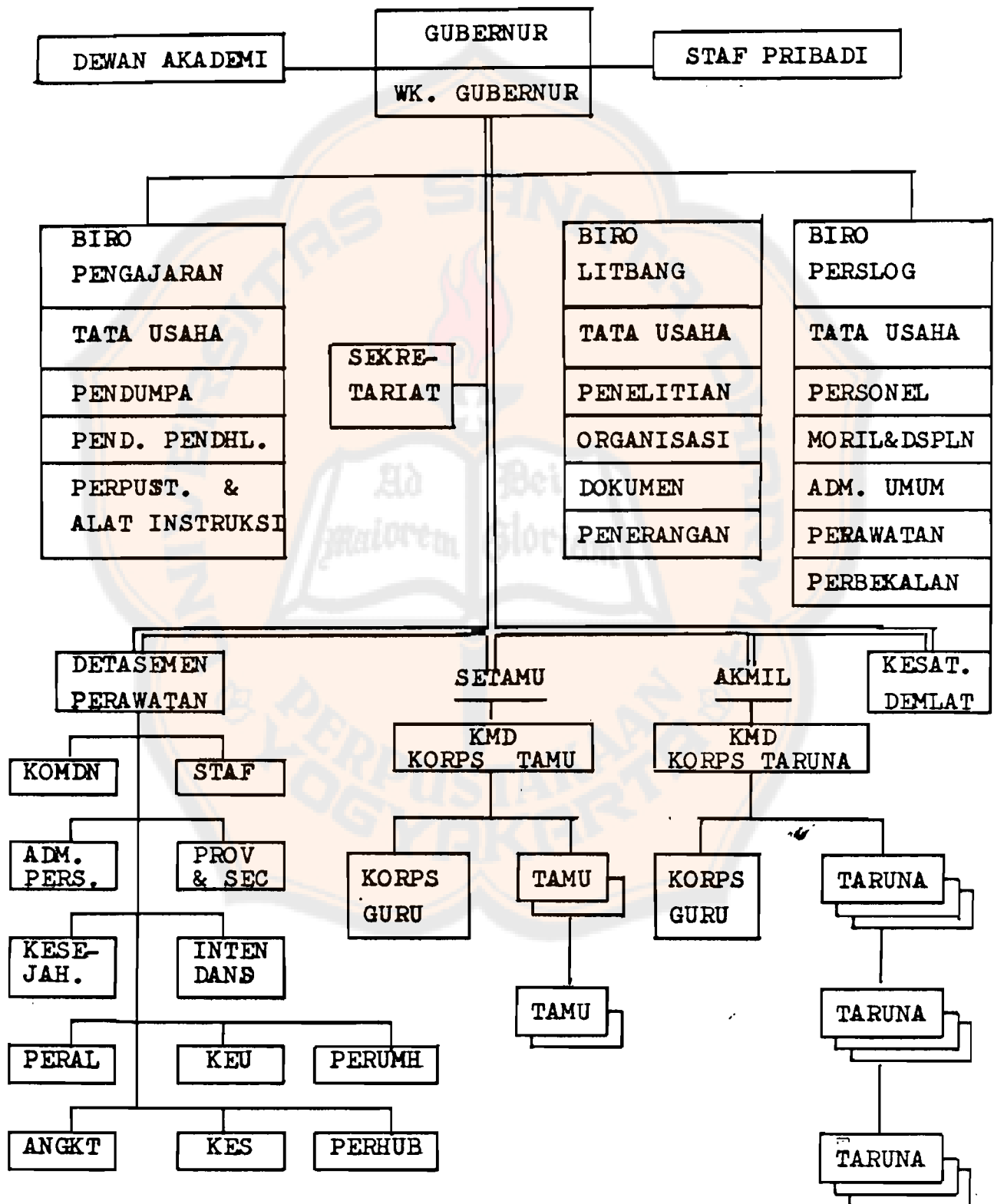
Taruna Muda dididik pada Sekolah Taruna Muda (Setamu) yang merupakan badan pelaksana dalam hal pemberian pengajaran mengenai Pendidikan Pendahuluan. Setamu tersebut di bawah pimpinan seorang perwira yang menjabat Komandan Korps Taruna Muda dan dibantu oleh Kelompok Komando yang membawahkan Korps Guru dan dua Batalyon Taruna Muda masing-masing terdiri atas tiga kompi yang setiap kompi terdiri dari tiga peleton.⁴¹ Sedangkan para Taruna lang-

⁴¹Ibid., hal. 15

sung mendapatkan pendidikan umum perwira pada salah satu badan yaitu Akademi Militer. Seperti pada Sekolah Taruna Muda, dalam Akademi Militer juga dipimpin oleh seorang perwira yang dibantu kelompok Komando yang membawahkan korps guru dan tiga batalyon, berbeda dengan Sekolah Taruna Muda yang hanya dua batalyon.

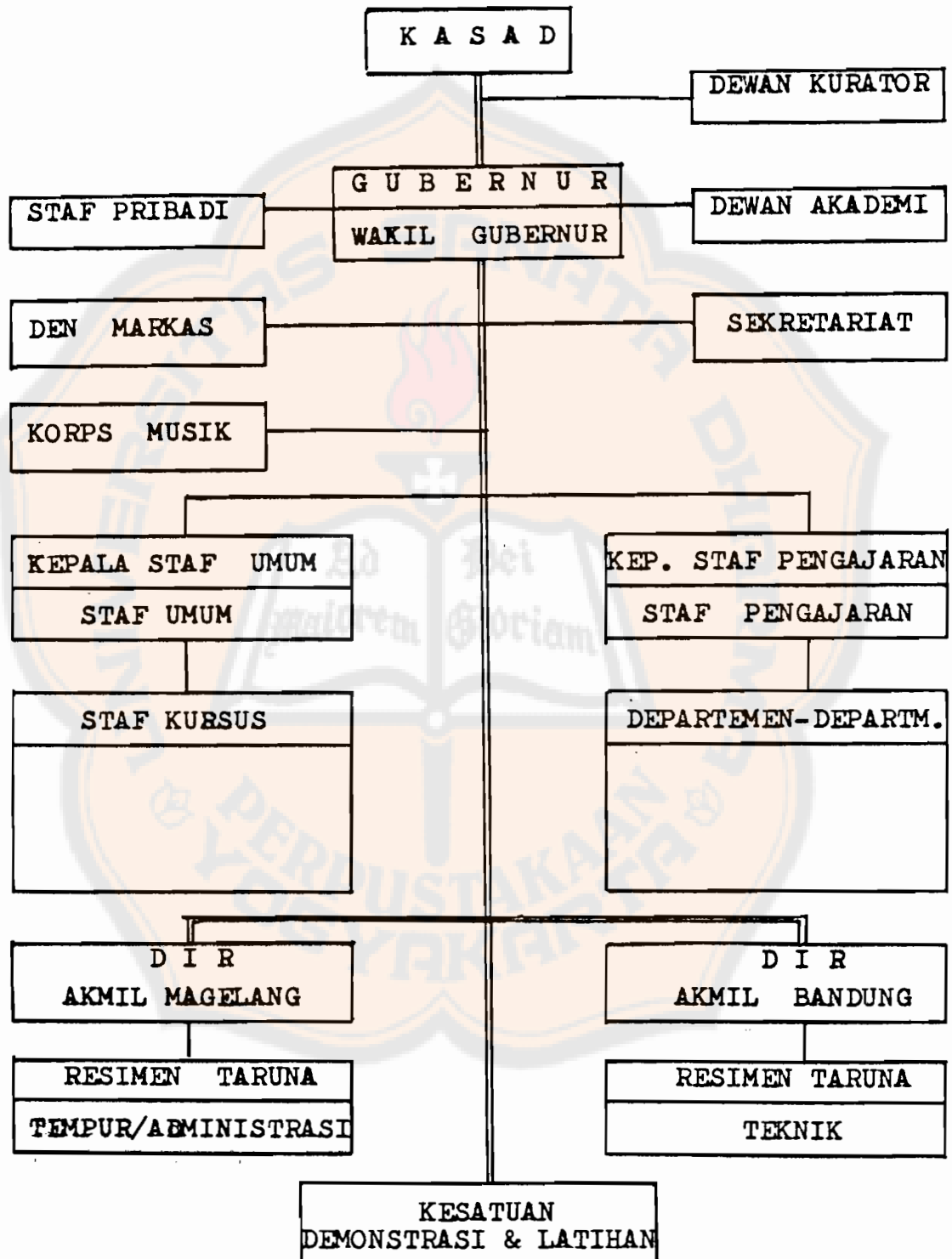
Namun setelah mengalami integrasi dengan Atekad, maka dalam strukturnya sedikit mengalami perbedaan. Perbedaan yang terlihat setelah integrasi adalah dengan adanya Dewan Kurator di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Pelaksanaan pendidikan pada tahap tersebut tidak ada lagi pendidikan pendahuluan melainkan hanya ada Akademi Militer Magelang dan Akademi Militer Bandung. Akademi Militer Magelang merupakan penjelmaan dari Akademi Militer Nasional, sedangkan Akademi Militer Bandung merupakan penyempurnaan dari Akademi Teknik Angkatan Darat. Sebagai gambaran perlu dilihat pada bagan berikut:

1. Struktur Organisasi AMN 1957⁴²



⁴²Sumber dari Lampiran Buku Petunjuk

2. Struktur Organisasi AMN setelah Integrasi dengan Ate-
kad Bandung⁴³



⁴³Sumber dari Arsip/dokumen Akademi Militer Nasional 1961

C. Rekrutmen dan Pembinaan Taruna

Dalam usa hanya memenuhi kebutuhan perwira, Angkatan Darat menempuhnya dengan beberapa cara: perwira yang masuk secara sukarela, Perwira Milisi / wajib militer, Perwira Cadangan maupun perwira khusus yang direkrut dari Perguruan Tinggi sipil. Perwira Sukarela dididik dalam Akademi Militer Nasional seperti tertuang dalam tugas pokok AMN untuk mendidik dan melatih pemuda Warga Negara Indonesia yang secara sukarela ingin menjadi perwira. Untuk mendapat calon perwira tersebut, AMN melakukan perekrutan melalui dua jalur. Pertama, dari umum yaitu masyarakat luas di luar Angkatan Darat sedangkan yang kedua direkrut dari lingkungan Angkatan Darat khususnya dari Bintara-bintara.

Perekrutan yang dilakukan dari masyarakat umum oleh AMN pada awalnya diambil dari dua sumber yang berlainan jenjang pendidikannya yaitu dari SMP-B dan SMA-B. Dari sisi jenjang kependidikannya apabila dibandingkan dengan Akademi Militer Yogya sudah ada peningkatan atau paling tidak terdapat perubahan yang bertolak dari pengalaman Akademi Militer Yogya berkaitan dengan sumber perekrutan. Hasil yang telah dicoba oleh Akmil Yogya membuktikan bahwa pada tahun 1945-1950 cukup berhasil merekrut Kadet dari tingkat SLTP, sedangkan untuk lulusan SLTA kurang begitu sukses. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Akademi Militer Nasional menggunakan strategi mengambil calon taruna dari dua macam jenjang pendidikan. Secara teknis mereka di klasifikasikan menurut asal jenjang kependidikannya. Calon

yang berasal dari SMP-B diklasifikasikan menjadi calon Taruna Muda sedangkan untuk calon Taruna diklasifikasikan-nya dari mereka yang berasal dari SMA-B. Baik calon Taruna Muda maupun calon Taruna, dalam proses penerimaannya secara umum menggunakan syarat-syarat yang sama, kecuali ijazah dan batas usianya yang berbeda. Bagi Taruna Muda batas usia antara 15 sampai 19 tahun, sedangkan untuk Taruna 18 hingga 22 tahun. Persyaratan lainnya yang menyangkut teknis administratif seperti: WNI laki-laki; tidak/belum pernah kawin, serta saanggup untuk tidak kawin selama dalam pendidikan, berkelakuan baik dll.⁴⁴ pada prinsipnya sama.

Dibandingkan dengan Akademi Militer Yogya, persyaratan penerimaan para taruna Akademi Militer Nasional lebih formal dan rasional. Hal tersebut dapat ditelaah dari sebagian isi persyaratan untuk kedua Akademi Militer. Seperti persyaratan dalam Akmil Yogya yang menyatakan bahwa untuk menjadi kadet harus mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk menumpahkan jiwa raga..., lebih cenderung merupakan syarat yang 'emosional' yang memang waktu itu mutlak diperlukan. Akan tetapi persyaratan tersebut dalam penerimaan taruna Akademi Militer Nasional tidak dieksplisitkan, walaupun syarat tersebut tetap diperlukan berdasarkan pertimbangan logis.

Ditiadakannya syarat tersebut di atas secara formal, bukan berarti dihapuskan sama sekali. Akan tetapi hal itu

⁴⁴ Mabes AD Dit. Adjen., op. cit., hal. 22

disinyalir dengan alasan bahwa mereka masuk secara suka rela sudah semestinya mengerti tugas dan kedudukannya sebagai calon prajurit/perwira. Fenomena di atas sangat berlainan jika kita perbandingkan dengan perkembangan jaman sekarang, bahwa para pemuda masuk menjadi taruna belum jelas atau belum tentu berindikasi menjadi prajurit suka rela sebagai alat negara, tetapi tidak menutup kemungkinan berindikasi mencarinya sebagai 'pekerjaan'. Sulit untuk mencari penyebabnya sebagai alasan untuk menyalahkan perubahan jaman yang memang memberi peluang bergesarnya dimensi emosional dan rasional dari fenomena tersebut.

Dengan melihat perkembangan pendidikan militer timbul pertanyaan mengapa siswa lulusan SMP-B dapat masuk sebuah Akademi Militer dan mengapa ada syarat lain untuk menjadi perwira harus lulusan SMA-B? Secara berskala jenjang kependidikannya lulusan SMP-B tidak dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tinggi seperti Akademi Militer. Sebab Akademi pada umumnya menerima lulusan dari tingkat SLTA. Namun demikian langkah itu ditempuh AMN mengingat ada klasifikasi dalam sistem pendidikannya sebelum menjadi perwira. Para lulusan SMP-B dengan predikat sebagai Taruna Muda sebelum menjadi Taruna harus mengikuti pendidikan pendahuluan selama dua tahun di Sekolah Taruna Muda, sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan umum perwira, agar secara akademis para Taruna Muda mendapatkan pengetahuan - nya sejajar dengan siswa lulusan SLTA. Dapat pula terbersit suatu maksud karena pada waktu itu masih banyak pemuda yang baru lulus SMP/SLTP, sehingga untuk mengangkat menja-

di setara dengan SLTA, AMN merasa mampu untuk menanganinya.

Melihat batas umur bagi taruna muda memberi kemungkinan terobosan dalam perekrutan, agar dapat diambil taruna-taruna muda yang setelah menjadi taruna kemudian menjadi perwira, periode masa baktinya dapat lebih lama dan dapat lebih lama dan dapat meningkatkan kariernya semaksimal mungkin walaupun faktor usia belum dapat dijadikan sebagai jaminan. Akan tetapi untuk regenerasi merupakan faktor penting. Setelah integrasi dengan Atekad, maka Sekolah Taruna Muda dihilangkan sehingga hanya ada Akmil Magelang dan Akmil Bandung,⁴⁵ yang berpengaruh pada perekrutan taruna. Sedangkan para taruna yang berasal dari SMA-B dididik langsung melalui Pendidikan Umum Perwira yang diselenggarakan oleh Akmil selama tiga tahun sebelum lulus dan dilantik menjadi Letna Dua. Persyaratan bagi taruna Akmil yang secara khusus dari SMA-B itu sejalan dengan tuntutan kebutuhan sebagai perwira jabatan yang dapat menempati pos-pos umum dalam lingkungan Angkatan Darat, Lebih jauh dari itu Angkatan Darat berusaha mencari kader - kader yang potensial dengan bekal pengetahuan eksakta yang memadai, karena mereka secara teknis akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang memang banyak menggunakan terapan ilmu eksakta. Selain dengan perekrutan yang demikian, mereka dituntut untuk berprestasi dengan menggunakan sistem tinggal kelas hanya satu kali selama pendidikan.

⁴⁵cf. struktur organisasi AMN

Proses perekrutan taruna AMN dari umum tidak terbatas pada syarat akademik saja, melainkan juga diadakan perekrutan yang bertendensi pada masalah teritorial. Dari masing-masing propinsi di seluruh Tanah Air dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam seleksi taruna dengan ketentuan maksimal tiga orang dan mereka harus berasal dari putera asli daerah.⁴⁶ Penerapan sistem teritorial dalam merekrut taruna lebih mempertimbangkan faktor etnis politis yang pada tahun 1950-an masih cukup rawan. Sebab pada waktu itu antara pemerintah pusat dengan daerah sering terbentur gejolak yang dipimpin oleh sebagian personel militer lokal seperti terjadi di Sumatera suatu pemberontakan yang serius yang dipimpin oleh partai Masyumi dan personel militer setempat.⁴⁷ Hal tersebut disinyalir juga oleh Nazaruddin sebagai bagian dari gerakan PRRI.⁴⁸ Pertimbangan ini dapat pula dilegalisasi untuk melestarikan keberhasilan yang telah dicapai sejak jaman revolusi sampai masa kemerdekaan di mana tradisi pemerintah bersama (sipil-militer) tingkat lokal yang berarti bukan merupakan pemerintahan orang Jawa sebagai suku yang dominan terhadap orang bukan Jawa.⁴⁹ Perhatian khusus masalah etnis tersebut sangat beralasan sebab semenjak hari-hari pertama Republik, korps perwira

⁴⁶Penerangan Angkatan Darat, Aku ke AMN, hal. 25

⁴⁷Morris Janowitz, Hubungan-hubungan Sipil-Militer terj. Sahat Simamora, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hal. 15

⁴⁸Nazaruddin Samsuddin, Integrasi Politik Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hal. 54

⁴⁹Morris Janowitz, op. cit., hal. 59

'tersekat' oleh tiga kendala yaitu organisasi ketentaraan antara bekas KNIL dan PETA, masalah Agama dengan berbagai pendiriannya serta yang ketiga adalah masalah etnik yang cukup kompleks.⁵⁰

Para taruna yang telah memasuki pendidikan di Akademi Militer Nasional mendapatkan pendidikan yang intensif. Mulai dari kehidupan sehari-hari sebagai insan militer sampai pada kehidupan masyarakat koleganya, dengan disiplin kuat dan rutinitaspun harus mereka lakukan dengan patuh. Keseragaman bukan saja pada pakaian melainkan juga pada kehidupan yang sering dijadikan gambaran senasib sepenanggungan dalam masyarakat, yang kadang-kadang sering terlepas dari dangkal dalamnya makna tersebut.

Dalam pembinaan disiplin kemelitiran para taruna, sudah diperkenalkan dengan pemakaian tanda pangkat yang menunjukkan senioritas terutama jenjang akademis dari sebelum dilantik dengan pangkat Capratar (calon prajurit taruna) hingga setelah dilantik menjadi perwira dengan pangkat Letnan Dua. Pemakaian simbol-simbol kepangkatan tidak lain untuk menumbuhkan kepatuhan, kesetiaan dan disiplin antara bawahan dengan atasan yang selalu dihadapinya langsung di lapangan.

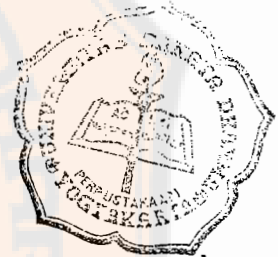
Hal lain dalam pembinaan taruna yang berkaitan dengan masalah finansial yang diberikan oleh negara kepada mereka berupa biaya hidup selama mengikuti pendidikan. Para taru-

⁵⁰ Ulf Sudhaussen, op. cit., hal. 22-24

na diberi dan disediakan bermacam-macam fasilitas, hiburan bahkan mendapat uang saku sehingga seakan-akan terkesanlah mereka sudah mendapatkan 'gaji' pemerintah. Walaupun hal ini menjadi antagonis dengan konsepsi 'sukarela' secara harafiah. Namun demikian, sebagai bekal untuk kerja keras dan untuk menanamkan maksud-maksud negara, maka hal ini sangat membantu dalam membina dan meningkatkan kesejahteraan. Berkaitan dengan semua itu, prinsip utama dalam perekrutan dan pembinaan taruna lebih cenderung diprioritaskan negara yang memang memerlukan tenaga perwira TNI-AD daripada sebaliknya.

D. Isi dan Pelaksanaan Kurikulum AMN

Kurikulum sebagai suatu sistem, sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan yang tak dapat dipisahkan. Menyoroti kurikulum AMN seperti di atas tidak jauh berbeda dengan umumnya, dalam kaitannya membentuk perwira TNI-AD di dalam konteks pendidikan militer. Suatu studi dilakukan dengan mencermati kurikulum yang kemudian mengkaitkannya dengan tugas pokok dan fungsi utama, juga pembinaan taruna guna menganalisis efektifitasnya dalam memenuhi sasaran yaitu terbentuknya kader pejuang yang sanggup mempertahankan negara. Adapun pembahasan sub bab ini terbatas menyorot tentang materi, isi dan tujuan pelajaran serta praktek pelaksanaannya berdasarkan pada Kurikulum Akademi Pendidikan Umum Perwira Akademi Militer Nasional untuk Angkatan VII



tahun Akademi 1960/1961,⁵¹ serta juga menggunakan manuskrip yang ada pada Bagsemtak Akmil Magelang.

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi utama, maka materi pokok dalam kurikulum AMN berisi pelajaran-pelajaran pengembang dari fungsi utama tersebut di atas. Secara global dapat diklasifikasikan menjadi tujuh materi yang diselenggarakan oleh masing-masing departemen, terdiri dari: Pendidikan militer utama; pendidikan militer umum; pengetahuan militer teknik; pengetahuan administrasi; eksakta; pengetahuan sosial dan pengetahuan bahasa. Ketiga materi pokok yang disebut pertama merupakan pendidikan khusus kemiliteran sebagai porsi utama, sehingga lainnya berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan fungsi utama kemiliteran. Dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran, maka pertemuan untuk pelajaran kemiliteran mencapai 56% dari keseluruhannya. Keterkaitan antara pendidikan kemiliteran dengan pendukungnya akan terlihat dalam isi dan tujuan pelajaran.

Pendidikan militer utama secara makro diberikan untuk memperoleh dasar-dasar kemiliteran sehingga memiliki basis yang kuat dalam menapaki tahap berikutnya. Materi pelajaran mencakup taktik dan teknik, pendidikan jasmani, kesehatan militer serta psikologi dan kepemimpinan militer. Mulai pendidikan tersebut mereka sudah mulai dialihkan dari kehidupan sipil ke dalam kehidupan dan pergaulan militer. Dasar pendidikan militer yang berupa pendidikan jasmani

⁵¹ "Kurikulum Akademi Pendidikan Umum Perwira Akademi Militer Nasional T.A. 1960/1961" dalam Akademi Militer Nasional, hal. 25

bertujuan untuk memperoleh konstelasi jasmani sebagai bekal untuk melaksanakan yang menuntut disiplin dan ketahanan fisik yang prima. Sedangkan pelajaran psikologi militer dan kepemimpinan merupakan arah dasar pendidikan para calon perwira yang selalu berkompeten dengan bermacam-macam corak pribadi dalam organisasi jabatannya. Mereka harus mengerti sifat-sifat umum sebagai manusia, hubungan antar manusia, kebutuhan-kebutuhannya sehingga akan membuat lannya jalan dalam proses kepemimpinannya.

Pengarahan fungsi militer yang lain, mengenai pendidikan militer umum dengan tendensi memberikan konsepsi-konsepsi tentang bagaimana gerak dan ruang lingkup Angkatan Darat khususnya sebagai alat pertahanan negara, dalam diri para taruna ditanamkan pengertian umum tentang perang dan juga lika-liku perang yang sangat diperlukan dalam pembinaan untuk memahami dari konsekuensi tersebut sehingga dapat mengantisipasi perkembangan jaman dan teknologi dalam masalah perang. Namun demikian yang fundamental dalam Angkatan Bersenjata kita adalah bagaimana mempertahankan keamanan nasional dengan berpangkal pada ideologi dan kondisi negara kita. Isi pelajaran yang disampaikan pada para taruna tidak lain menyangkut soal ilmu perang, sejarah perang, pengetahuan geografi militer, taktik umum, serta pengetahuan umum perang wilayah yang merupakan konsepsi utama dalam sistem perang darat di Indonesia, yang terlahir dengan berhasilnya perang gerilya.

Pengetahuan militer teknik yang merupakan pendidikan militer ke tiga, menekankan segi operasional dalam per-

tempuran. Berbagai sarana dan prasarana di dalam pertempuran 'dimodifikasikan' ke dalam materi pelajaran sehingga akan menjadikan wahana pembentukan kematangan pemahaman maupun teknis pelaksanaannya. Mereka dihadapkan dengan materi seperti topografi militer yang berkaitan dengan pemetaan, pengetahuan artileri yang menyangkut efektifitasnya, dan juga peralatan-peralatan kavaleri. Di samping itu diberikan pula pelajaran yang menunjang teknis operasional pertempuran seperti perhubungan, logistik, serta perawatan atau pemeliharaan semua peralatan pertempuran.

Pengetahuan militer teknik itu baru sebatas pemahaman apabila tidak disertai dengan daya terasap dan kesanggupan pengembangan akan selalu menjadi pengetahuan yang 'mati', sebab kemampuan teknologi selalu berada terus di depan penerapan hasil teknologi. Dengan konteks yang demikian akan terjadi pengakumulasian antara pola pikir konseptual ke pola pikir yang pragmatik dalam pendidikan militer.

Di luar pengetahuan militer, dituangkan juga materi administrasi yang berisi suatu studi akademis mengenai organisasi dan pembinaan untuk mendapatkan jalan pikir dan daya kerja yang rasional serta efisien dalam melakukan tugas perwira sebagai pembina manusia dan alat. Pembinaan tadi merupakan bentuk suatu usaha yang harus ditempuh baik bagi kepentingan umum maupun militer, yang pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan operasional. Pentingnya pembinaan administrasi juga terletak pada pelaksanaan penentuan keputusan yang tepat guna. Sebab dalam setiap keadaan, menjadi tanggung jawab pembina militer untuk memberi kepu-

tusan yang tepat tentang cara penggunaan tenaga manusia ataupun peralatan yang ada padanya,⁵² atas dasar perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi dan pengontrolan.

Materi dasar lain yang terkait adalah pengetahuan eksakta. Pengetahuan tersebut diberikan dalam porsi yang cukup besar, bahkan terbesar setelah pengetahuan kemiliteran sekitar 18-20% dari materi seluruhnya. Oleh karena itu, para taruna yang direkrut Akademi Militer Nasional dengan prioritas utama lulusan SMA-B. Bukan berarti mengesampingkan pengetahuan lain, akan tetapi pengetahuan eksak praktis banyak dipergunakan dalam bidang operasi militer, seperti tampak dalam tujuan pelajaran yang diharapkan mampu mengikuti pelajaran-pelajaran di Akademi Militer Nasional, dan sekolah-sekolah cabang. Selain itu supaya tertanam cara berpikir pasti agar dapat mengikuti kemajuan dan juga perkembangan dalam teknik persenjataan dan peralatan militer. Kecuali harapan untuk dapat mengetahui secara konseptual, dengan pengetahuan eksakta diharapkan dapat memperoleh kemampuan praktis untuk mengembangkan daya cipta persenjataan, perbaikan serta perawatan peralatan. Untuk menjangkau semua sasaran tersebut diberikan ilmu pasti, fisika, mekanika, ilmu kimia sebagai dasar pengembangannya ke arah kemandirian berpikir dan bertindak.

Untuk dapat mengembangkan lebih lanjut, para taruna

⁵²Dept. Administrasi, Diktat Management Militer, SK. Gubernur Akabri Udarat No. KEP-46/4/1969 (terbatas), hal.7

mendapatkan. pelajaran pengetahuan sosial dan bahasa. Pengetahuan yang diolah oleh Akademi Militer Nasional bertolak dari filsafat, hukum, sosiologi, ilmu politik, ekonomi serta ilmu agama, sedangkan pengetahuan bahasa yang diutamakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, disamping terdapat tiga pilihan lain yakni bahasa Jerman, bahasa Jepang dan bahasa Cina. Dengan materi filsafat terutama filsafat Pancasila dapat memberi dasar-dasar penghayatan agar para taruna memiliki pegangan hidup yang kuat yang dapat diamalkannya dalam kegiatan militer demi kepentingan ketentaraan dan kemasyarakatan.

Selain filsafat, pengetahuan hukum yang meliputi: pengantar hukum, hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara, hukum perang dan hukum perjanjian diberikan sebagai komponen penunjang. Pengantar hukum mengarahkan agar para taruna menghayati keadilan dan akan memberikan dasar pada cabang-cabang hukum lainnya seperti tersebut di atas, yang kesemuanya menuntut diri para taruna untuk bertindak dan dapat menggunakan wewenang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai prajurit yang memiliki disiplin yang luhur. Hukum perang yang berintikan masalah perbatasan perang, pendudukan, kenetralan, dan ketentuan-ketentuan guna mengurangi bahaya perang, diharapkan dapat mengantarkan calon perwira sehingga mampu menjalankan tugas utamanya sesuai hukum yang berlaku.

Dalam hubungan kemasyarakatan, sosiologi, ilmu politik, ekonomi dan juga ilmu agama merupakan faktor yang harus diperhatikan. Sosiologi memberikan dasar-dasar dan po-

kok-pokok pengertian hubungan sosial agar mampu menilai dan menganalisis fenomena-fenomena sosial yang dihadapi sehingga dapat menempatkan diri akan perannya dalam kehidupan bersama. Hal di atas ditunjang dengan pemberian materi ilmu politik yang penting untuk menilai dan menganalisis secara obyektif gejala-gejala politik yang dihadapi serta yang erat kaitannya dengan kehidupan politik Indonesia. Sedangkan masalah ekonomi yang dalam pembangunan menuntut perlunya stabilitas ekonomi, ditolelir dengan pemberian materi mengenai ekonomi Indonesia, tinjauan historisnya, ekonomi pembangunan dan juga masalah kependudukan. Mengenai masalah agama yang mewarnai perikehidupan bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama maupun kepercayaan diantisipasi dengan pemberian materi umum pengetahuan umum agama. Terakhir mengenai pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dimaksudkan agar dalam komunikasi sebagai sarana hubungan manusia yang manusiawi mampu melahirkan dan mengutarakan pikiran dalam bahasa singkat dan jelas baik lisan maupun tertulis terutama dalam pengetahuan militer.⁵³

Sekilas dengan uraian di atas dapat dihadirkan gambaran global bagaimanapola pembentukan taruna pada masa Akademi Militer Nasional terutama sebelum tahun 1965. Untuk dapat menghadirkan materi bahasan sebagai komparasi, maka dalam bab berikutnya akan dipaparkan tentang pembeda

⁵³cf. Kurikulum AMN T.A. 1960/1961

tukan Perwira TNI-AD dalam masa Akabri, sehingga sedapat - dapatnya diperoleh deskripsi komparatif tentang pembentukan perwira antara periode Akademi Militer Nasional dan periode Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.



BAB IV

PEMBINAAN TARUNA DI AKABRI

Medium tahun 1960-an, di dalam tubuh Angkatan Bersenjata kita terdapat divergensi. Untuk mencegah berkembangnya divergensi ke arah yang kutang sehat, maka dilakukan pendekatan lewat jalur pendidikan dengan menyatukan keempat lembaga pendidikan tinggi militer Angkatan Darat, Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian ke dalam Akabri, Supaya dapat runtut dalam mendalami pembinaan para taruna di Akabri maka penulis mengambil prioritas pada masalah latar belakang penyatuan, pembinaan integrasi, pembinaan doktrin dan juga penggalangan kepemimpinan.

A. Arah Pembentukan Akabri

Akabri yang dibentuk pada masa transisi antara Orde Lama dan Orde Baru, memiliki dimensi strategis maupun politis. Masa transisi tersebut terlihat dengan adanya pertentangan politik dan ideologi pada tahun 1965-1966, dengan dampak berakhirnya suatu kepemimpinan yang sekarang digambarkan sebagai Orde Lama, serta merupakan awal kepemimpinan Orde Baru dengan Suharta sebagai figure head TNI-AD.⁵⁴

Untuk membangun kekuatan ABRI semenjak tahun 1962

⁵⁴Istilah tersebut digunakan oleh Yahya A. Muhaimin dalam buku Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hal.190-194

sudah dilakukan secara baik dengan dana yang cukup besar. Oleh karena penyempurnaan tersebut dalam situasi pertentangan politik, maka oleh PKI disinyalir sebagai penyebab kemerosotan ekonomi, di samping adanya Trikora dan Dwikorera. Memang hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa pada tahun 1962 ABRI menggunakan uang negara sebesar 80% dari penerimaan.⁵⁵ Kondisi semacam itu dimungkinkan oleh usaha PKI untuk membentuk Angkatan ke lima di luar Angkatan Laut Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Kepolisian, yang selalu mendapat tentangan TNI-AD. Usaha dan agitasi PKI memang untuk memecah belah kekuatan Angkatan Bersenjata baik antarangkatan maupun antara ABRI dengan rakyat. Dimaksudkan juga untuk mempersenjatai buruh dan tani sebagai kekuatan proletariat yang kemudian akan diintegrasikan dengan Angkatan Bersenjata yang sudah ada dalam pengaruhnya.

Divergensi dalam ABRI memuncak dari usaha TNI-AD untuk menghambat pembentukan Angkatan ke-5 yang konsepnya tidak menentu, hingga timbulnya usaha pemerintah untuk mengalihkan perhatian pada pembentukan kekuatan di luar TNI-AD dengan menjadikan pasukan andalan Corps Marinir KKO serta membentuk Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa.⁵⁶ Iklim yang demikian itu menimbulkan iri serta kecurigaan antar-Angkatan dalam membangun kekuatannya yang kemudian oleh

⁵⁵A.H. Nasution, "Prasaran Wapangsar Kogam untuk Munas Ekonomi tanggal 7-10 Mei 1966" dalam 1 Oktober 1965 Kebangkitan 1966 Koreksi/Pembaruan/Pembangunan (Jakarta : tanpa penerbit, 1974), hal. 15

⁵⁶Todiruan Dydo, loc. cit.

PKI akhirnya dimanfaatkan juga untuk terus menerus menghimpun kekuatan kontra di tubuh kalangan tentara sendiri.⁵⁷ Keberhasilan usaha tersebut terletak pada upaya mempengaruhi secara intensif komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa Letkol Untung, yang mencapai puncaknya pada peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.

Dengan latar belakang kehidupan TNI pada masa-masa itu, maka munculnya gagasan pembentukan Akabri oleh Jendral TNI Gatot Subroto, orientasinya sudah jelas. Sebagai suatu kesimpulan global, usaha tersebut mempunyai tendensi bahwa harus diperlukan suatu kekuatan ekstra untuk dapat mengalahkan PKI yang kelihatan semakin meningkat prestasinya. Walaupun sebenarnya awal peresmian Akabri sudah tiga bulan lebih sebelum meletus pemberontakan, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden No. 155 tahun 1965 tanggal 6 Juni 1965. Logisnya kekuatan ekstra tersebut ada pada TNI apabila masing-masing Angkatan dan Polri bersatu sebagai satu kekuatan nasional yang utuh. Oleh karenanya integrasi sangat diperlukan, dan jalan yang paling efektif dapat dilakukan melalui pendidikan sehingga secara fisik akademi-akademi Angkatan dan Polri harus diintegrasikan ke dalam Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Selain untuk membentuk kekuatan ekstra menghadapi ancaman PKI, maka setelah pemberontakan terjadi semakin ditingkatkan dengan alasan untuk mencegah terulangnya insiden seperti di atas serta untuk menjaga keberhasilan yang

⁵⁷Ibid., hal. 76

telah dicapainya terutama dalam menghadapi PKI, sehingga ABRI memperoleh posisi penting dalam pemerintahan maupun di hati rakyat Indonesia. Sedangkan sasaran intern yang akan dicapai dengan integrasi adalah untuk membina kekom-pakan, keutuhan, kesa-tuan dan persatuan ABRI yang meme-nuhi syarat-syarat dan ciri-ciri:

- a. Mempunyai satu landasan mental dan ideologi;
- b. Mempunyai satu doktrin;
- c. Dikendalikan oleh satu kebijaksanaan yang terpu-sat;
- d. Struktur tidak memberi peluang baik bagi munculnya rivalitas maupun kontroversi antar-Angkatan/Polri;
- e. Tidak mempunyai dan menonjolkan kepentingan-kepentingan sendiri-sendiri kecuali kepentingan ABRI , secara keseluruhan.⁵⁸

Dalam perkembangan selanjutnya setelah ABRI mendapat posisi, memberikan indikasi bahwa peta politik dalam tubuh ABRI sudah menggambarkan bahwa mereka bukanlah merupakan alat hankam saja, melainkan lebih dari itu, juga mempunyai peran sebagai kekuatan sosial sehingga sudah semestinya akan bergerak dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, so-sial bahkan juga kebudayaan. Hal itu akan lebih jelas da-lam usaha pembinaan prajurit yang diharapkan memiliki ke-sadaran dan ketahanan sebagai insan hamba Tuhan, insan po-litik, insan ekonomi, insan sosial budaya serta insan pra-jurit Pancasila.⁵⁹ Untuk mewujudkan peran dan tugas da-lam mencapai tujuannya diperlukan kader-kader terutama ca-

⁵⁸SK Menhankam/Pangab No. Skep/1383/X/1977, tanggal 24 Oktober 1977

⁵⁹Dephankam, Pola Dasar Pembinaan Mental ABRI. Pinaka Baladika (terbatas), dengan SK Menhankam/Pangab No. SKEP/B/562/VII/1971 tanggal 26 Juli 1971, hal. 17-18

lon perwira yang dididik sebagai pemimpin yang dapat mengendalikan dan menggerakkan kekuatannya melalui korps perwira dalam Akabri yang merupakan pembentukan jiwa, mental dan ideologi yang kuat, yang ditunjang dengan kekuatan fisik/jasmani, intelegensi serta ketrampilan teknis. Dasar pemikiran lain tentang pentingnya integrasi seperti dijelaskan oleh Wapangab dalam Commander's Call ABRI tahun '70:

"...dalam setiap organisasi, personel kaderlah yang terpenting, dan dalam organisasi hankam, personel kader ini adalah golongan perwira yang merupakan tulang punggung dari Angkatan Bersenjata, maka diambil-lah keputusan menjelang akhir tahun 1965 untuk mengintegrasikan Akademi-akademi Angkatan menjadi hanya satu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tujuan utama dari Akabri ini terletak di bidang kejiwaan yang diinginkan bahwa setiap alumnus Akabri akan sepenuhnya menjadi anggota Corps Sapta Marga yang bertanggung jawab, yang menjadi ideedraget dari pada kesatuan dan persatuan ABRI dan bukannya seorang Perwira Remaja yang menonjolkan kepentingan Angkatannya.⁶⁰

Oleh karena pendidikan dipandang sebagai wahana untuk membentuk kekuatan dalam pembangunan ABRI, maka pendidikan akan banyak memberi sumbangan bagi pengembangan kekompakan ABRI. Pembibitan kader-kader Pimpinan Nasional, sangat diperlukan guna mewujudkan pemimpin-pemimpin Nasional yang memegang prinsip-prinsip wawasan keseimbangan di antara kepentingan prosperity dan security sebagai dasar pembinaan kerja sama antara sipil dengan ABRI.⁶¹ Dengan

⁶⁰ Dephankam Mabes TNI-AD, Buku Petunjuk Sistem Pendidikan TNI-AD (terbatas), dengan pengesahan keputusan KASAD Nomor: KEP-21/XII 1973 tanggal 28-12-1973, hal. 17-18.

⁶¹ Dephankam Akabri Udarat (terbatas), Realisasi Pembangunan Hankamnas dan Kekerjaan ABRI (Staf Hankam, 1986) hal. 61

demikian diperlukan pembinaan integrasi taruna di Akabri baik antartaruna maupun antara taruna dengan masyarakat.

B. Pembinaan Integrasi Taruna

Salah satu dasar pembangunan ABRI adalah meningkatkan integrasi ABRI. Sasaran tersebut pada awal Orde Baru meliputi tiga bidang pokok yaitu integrasi pada bidang pendidikan, bidang doktrin dan bidang organisasi.⁶² Doktrin yang merupakan pedoman pengembangan pengalaman berdasarkan teori, juga perlu diintegrasikan, mengingat sebelumnya masing-masing Angkatan mempunyai doktrin sendiri. Angkatan Darat dengan doktrinnya Tri Ubaya Cakti, Angkatan Laut dengan doktrin Jales Viva Jaya Mahe, Angkatan Udara memiliki doktrin Swa Buana Paksi serta doktrin Tata Tentrem Karta Raharja untuk Kepolisian, yang kesemuanya berorientasikan pada perjuangan matra masing-masing. Oleh karena itu keem-
patnya diintegrasikan dengan satu doktrin perjuangan dasar yaitu Cadek (Catur Darma Eka Karma). Salah satu faktor positif yang menjadi pengaruh adalah, adanya perkembangan perang modern yang tidak mungkin dihadapi oleh salah satu kekuatan matra saja, melainkan memerlukan operasi penyelesaian oleh berbagai matra secara padu.⁶³ Selanjutnya dalam usaha pembinaan pendidikan perlu adanya integrasi psikologis taruna.

⁶²Pusat Sejtra ABRI, 40 Tahun ABRI II 1965-1985 (Mabes ABRI: 1985), hal. 63

⁶³Dephankam Akabri Udara (terbatas), op. cit., hal. 64

Di dalam Akabri yang terhimpun dari para taruna masing-masing Angkatan/Polri memberi corak yang kompleks, yang menyangkut pribadi dan loyalitas kemitraan. Kedua unsur pokok tersebut supaya terintegrasi harus terlebih dahulu ditanamkan solidaritas. Solidaritas dalam suatu kelompok akan sangat berpengaruh dalam proses integrasi.⁶⁴ Penanaman solidaritas tersebut didahulukan melalui pendidikan dalam arti luas, baik secara struktural maupun kurikulum. Secara struktural sudah jelas pada pembentukan Akabri yang berimplikasi sebagai pengendalian satu kebijaksanaan terpusat sehingga memungkinkan untuk menangkal peluang rivalitas antar-Angkatan/Polri. Sedangkan secara kurikulum harus dilakukan pendidikan tunggal calon perwira dalam Akabri sebelum mereka melanjutkan pendidikannya di Akabri Bagian.

Pembinaan integrasi itu diperlukan baik secara vertikal maupun horisontal. Integrasi vertikal untuk menumbuhkan semangat korps yang kuat antara atasan dengan bawahan, dalam jenjang kemiliteran di mana mereka dapat membina ide yang dijunjung bersama. Integrasi kedua secara horisontal dalam hal ini secara luas menyangkut masalah teritorial dan dalam Akabri orientasinya menyangkut juga kemitraan Angkatan dan Polri, sehingga mereka tidak menonjolkan kepentingan-kepentingan antar-Angkatan, melainkan 'mengahdi' pada kepentingan ABRI. Oleh karena itu, personel personel yang akan menentukan kebijakan demi kepentingan

⁶⁴Nazaruddin Zamsuddin, op. cit., hal. 110

ABRI yang merupakan kader utama harus dibina agar dapat merupakan tulang punggung kekuatan.

Wahana pembinaan integrasi taruna tersebut, dilakukan dengan berbagai rangkaian kegiatan baik yang bersifat intern untuk kalangan taruna sebagai pembinaan kekompakan ataupun yang bersifat ekstern dengan melibatkan masyarakat, untuk menumbuhkan pandangan bahwa ABRI manunggal dengannya atau rakyatnya. Bukti ditumbuhkannya pandangan di atas seperti yang dimonumentasikan oleh Presiden Suharto:

Rakyat dan ABRI selalu manunggal,
perjuangan dan cita-cita pantang gagal,
Negara Pancasila tetap jaya dan kekal,
Berkat Ridho Tuhan Yang Maha Tunggal.⁶⁵

Kegiatan integrasi intern yang paling pokok adalah pendidikan dasar keprajuritan Chandradimuka, yang merupakan sarana 'Penggodogan' calon-calon taruna ABRI dari semua Angkatan dan Polri. Pendidikan dasar tersebut dilaksanakan di Akabri Bagian Udarat selama 17 minggu. Seperti dalam cerita pewayangan, maka integrasi Chandradimuka itu betul-betul merupakan ujian yang sangat berat dengan menitik beratkan pada perubahan perilaku sipil ke militer, dan juga untuk menentukan lulus tidaknya sebagai taruna Akabri secara pasti. Arah dari program tersebut untuk membentuk prajurit dengan pengetahuan dan latihan agar memperoleh kecakapan perorangan yang mantap dan praktis serta siap untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan selanjutnya pada Akabri Bagian masing-masing.

⁶⁵ Terdapat pada Relief Ruang Garba Monumen Yogya Kembali, tertanggal 6 Juli 1988

Ketrampilan dan ketangkasan perorangan itu diberikan melalui materi pelajaran seperti: pendidikan dasar pertempuran, pendidikan tingkat regu dan peleton, IMPK (Ilmu Medan dan Peta Kompas), pengetahuan senjata dan menembak, perkuatan medan, perhubungan dan peraturan militer dasar/permildas.⁶⁶ Materi tersebut diberikan untuk mendapatkan kemampuan personel yang diperlukan agar memiliki sikap perilaku dan kepribadian sebagai prajurit ABRI yang mewarisi semangat 45, bermental tinggi, punya motivasi belajar dan berlatih juga mempunyai jiwa setia kawan dan kerja sama.

Dalam penggemblengan mental kejuangan dan kepemimpinan dilakukan melalui penghayatan route gerilya Panglima Besar Soedirman. Kegiatan itu dilakukan mengingat bahwasanya dari berbagai pertimbangan mendudukkan beliau sebagai Bapak TNI yang memiliki kharisma tinggi baik untuk kalangan TNI maupun hubungan dengan rakyat. Ia sebagai yang tidak banyak bicara, selalu memberi contoh melalui perbuatan, ketaatan beliau terhadap bangsa serta pengabdianya pada negara⁶⁷ memberi indikasi untuk itu. Oleh karena itu sebagai bukti untuk memanifestasikan nilai kejuangan dan kepemimpinannya dilakukan dengan napak tilas rute gerilya dengan segala bentuknya, juga diadakan kerja bakti bersama masyarakat sebagai konsekuensi peran sertanya masyarakat dalam perang gerilya.

⁶⁶ Diambil dari Rangka Pokok Pelajaran Akabri Bagian Umum dan Darat dengan SK No. SKEP/D/21/II/1976, tertanggal 5 Pebruari 1976, lamp. A

⁶⁷ Dephankam Akabri Udarat, (terbatas), Diktat Route Gerilya Pangsar Soedirman, 1980, hal. 1

Proses pembinaan integrasi taruna dilakukan pula melalui cabang olah raga. Pekan Olah Raga Taruna (porsitar) yang diselenggarakan sekitar lima hari setiap dua tahun sekali bergantian dengan acara olah raga 'trengginas' (olah raga khusus atletik), diselenggarakan oleh masing-masing Akabri Bagian secara bergilir biasanya dilaksanakan pada bulan Maret.⁶⁸ Porsitar dan trengginas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketangkasan dan ketangguhan jasmani serta untuk meningkatkan persahabatan antartaruna.

Pada tingkat akhir pendidikan yang segera akan terjun ke lapangan, diberikan latihan integrasi taruna Wreda atau Latsitarda, mirip dengan kegiatan KKN bagi Perguruan Tinggi umumnya. Latsitarda dilaksanakan selama satu bulan dengan mengambil suatu lokasi latihan. Pada awalnya lokasi yang dipilih adalah di Jawa, akan tetapi mulai tahun 1979/1980 dilakukan juga di luar Jawa dengan istilah Latsitarda Nusantara karena orientasinya untuk mengembangkan ke seluruh Indonesia. Dalam sitarda diikuti pula para mahasiswa dan masyarakat dengan tujuan umum menjalin integrasi taruna, mahasiswa dan masyarakat untuk mencoba memecahkan problema masyarakat. Sedangkan secara khusus agar taruna dan mahasiswa memperoleh pengalaman memecahkan masalah yang berkaitan dengan ketahanan nasional setempat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta kondisi setempat.⁶⁹

⁶⁸Wawancara penulis dengan Bapak Moech Syaref, Bagpen humas Akmil Magelang, tanggal 27 Pebruari 1991

⁶⁹Akabri, (Rahasia), Buku II Latihan Integrasi Taruna Wreda "Bhakti Yudha", tahun 1977, hal. 1

Untuk itu mereka mengadakan serangkaian kegiatan meliputi: operasi bhakti, riset sosial, olah raga dan penyuluhan. Khusus bidang penyuluhan mencakup penyuluhan rohani keagamaan dan mental ideologi dengan sasaran masyarakat pedesaan dengan kegiatan penyuluhan tentang pokok-pokok pengertian tentang Pancasila, bahaya laten komunisme, dan demokrasi Pancasila.⁷⁰ Aktivitas kegiatan penyuluhan merupakan sarana pembinaan ketahanan nasional dan bela negara bagi rakyat bederta ABRI sebagai pembina kekuatannya.

Kegiatan integrasi yang terakhir selama pendidikan adalah kegiatan berupa Praspas (Prasetya Perwira) yaitu kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah perwira lulusan Akabri oleh Presiden RI dan merupakan puncak peristiwa dari seluruh kegiatan satu perangkat umum kurikulum Akabri. Pelaksanaan Praspas bertolak dari suatu tujuan bahwa semua Perwira dari masing-masing Angkatan dan Polri tetap merupakan satu korps Perwira ABRI yang utuh walaupun dididik dan dilatih dengan penekanan mata yang berbeda. Penyelenggaraan Prasetya Perwira ditangani langsung terpusat oleh Markas Komando Akabri walaupun pelaksanaannya diadakan secara bergantian tempatnya di setiap Akabri Bagian. Selama pendidikan para taruna dievaluasi dan bagi taruna yang lulus terbaik, pada upacara Praspas diberi tanda penghargaan, berupa piagam Adi Makayasa oleh Komandan Jendral Akabri. Pemberian penghargaan tersebut sekedar untuk mengungkapkan balas jasa atas prestasi yang diperolehnya. Setelah dilan-

⁷⁰ Ibid., Lampiran Sitarda 77-9

tik sebagai Perwira dengan pangkat Letnan Dua, maka para Perwira langsung memperoleh hak-hak seperti: gaji, tunjangan, kenaikan pangkat, pemeliharaan kesehatan dan juga cuti dengan kewajiban melaksanakan tugas-tugas di kesatuan masing-masing untuk TNI-AD setingkat dengan Komandan Peleton.⁷¹

Kecuali dibina dan diarahkan akan pentingnya integrasi pada para taruna, dalam diri mereka juga ditanamkan doktrin sebagai sarana pengembangan mental ideologi. Sebab dengan adanya kesatuan wawasan dalam suatu kelompok akan memberi arah dan tujuan yang jelas dalam perjuangan dan gerakannya. Oleh karena itu disadari perlunya penanaman doktrin pada diri taruna begitu pula para generasi muda TNI-AD.

C. Pembinaan Doktrin dan Kepemimpinan

Salah satu sisi penting dalam pembinaan personel taruna dalam periode Akabri adalah pembinaan doktrin dan kepemimpinan yang berbeda dari masa sebelumnya. Perbedaannya dapat ditinjau dari macam doktrin yang diberikan, serta intensitasnya. Pada masa pendidikan di Akademi Militer Nasional, doktrin TNI-AD khususnya belum dituangkan dalam kurikulum, sebab doktrin TNI-AD yang awal baru dirumuskan awal bulan April 1965 dengan munculnya doktrin Tri - Ubaya

⁷¹Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Praspa ABRI 1984, Jakarta, hal. 5-7

çakti⁷² lebih dimungkinkan lagi penanaman doktrin tersebut dirasa perlu setelah terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Alasan dasar lain yakni dengan diberikannya doktrin akanlah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membina kejiwaan para taruna ABRI umumnya.

Dalam Akabri, pembinaan doktrin dan kepemimpinan merupakan kesatuan tersendiri dalam kaitannya dengan seluruh program pembentukan perwira. Doktrin diperlukan sebagai dasar pengembangan jiwa kepemimpinan yang jelas tersermin dari prosentase waktu yang diberikan yaitu sekitar 40%, sedangkan psikologi kepemimpinan mencapai kurang lebih 31%.⁷³ Adapun pengetahuan kejiwaan yang dijadikan dasar pengembangan keperwiraan diberikan mulai tingkat awal hingga tingkat akhir yang meliputi: Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Satue Dharma Eka Karma.

Sapta Marga yang merupakan kode kehormatan atau pegangan hidup setiap prajurit ABRI yang dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan tujuan, memiliki lima sasaran. Pertama, untuk mempersatukan jiwa keprajuritan agar setiap insan prajurit mempunyai pijakan yang sama dalam menegakkan cita-cita. Kedua, memusatkan semangat keprajuritan pada kesatuan hidup. Ketiga, meresapkan jiwa Pancasila dalam hidup keprajuritan. Mengapa Pancasila? Hal itu telah dijabarkan oleh GPH. Djatikusumo bahwa dengan Pancasila dapat

⁷²Yahya A. Muhaimin, op.cit., hal. 141

⁷³Rangka Pokok Pelajaran..., op. cit., lampiran B., hal. 5-7

mencegah terjadinya 'Baratayuda'.⁷⁴ Keempat, Sapta Marga mempersatukan perjuangan Angkatan Bersenjata pada satu dasar keyakinan. akan tujuan perjuangan. Sedangkan yang kelima, membentuk persatuan tradisi prajurit sebagai Bhayangkari bangsa Negara.⁷⁵ Dengan demikian, sasaran umumnya adalah agar segala perilaku prajurit menjadi terarah dan terbina, sebab mulai dari ideologi, tujuan dan tingkah lakunya dapat dipertanggungjawabkan lebih-lebih pada sum-pahnya sebagai tentara.

Selain Sapta Marga, ABRI memiliki satu doktrin perjuangan yakni Catur Dharma Eka Karma. Cadek itu berisikan doktrin hankamnas dan doktrin pelaksanaan pembinaan Abri, yang mana doktrin tersebut merupakan pengejawantahan dari semua Angkatan dan Polri. Sejauhmana efektifitas doktrin yang diberikan kepada para taruna yang dipersiapkan sebagai pimpinan nantinya, akan tergantung pula pada pembinaan dasar kepemimpinan.

Di dalam TNI-AD khususnya, maupun ABRI pada umumnya, kepemimpinan dijadikan patokan berhasil tidaknya suatu perjuangan karena hal tersebut dapat dimaklumi melihat sistem garis komando sebagai ciri khas Angkatan Bersenjata memegang peranan penting di bawah 'kendali' seorang pimpinan. Dalam kaitannya dengan doktrin Catur Dharma Eka Karma, ma-

⁷⁴GPH. Djatikusumo, Mengapa Panca sila?: Ceramah Penataran Pegawai Staf DPA 4 Juli 1979, hal. 4

⁷⁵Dephankam, Sapta Marga ABRI (SK. Menhankam / Pangab No. SKEP/B/827/X/1972 tgl. 5 Oktober 1972), hal. 13-16

ka seorang pemimpin harus memiliki 11 azas kepemimpinan:

1. Taqwa, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat kepada-Nya
2. Ing Ngarsa Sung Tulada, yaitu memberi suri tauladan di hadapan anak buahnya
3. Ing Madya Ma ngun Karsa, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah
4. Tut Wuri Handayani, ya itu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah
5. Waspada Purba Wasesa, yaitu selalu waspada mengawasi serta sanggup dann berani memberi koreksi kepada anak buah
6. Ambeg Parama Arta, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan
7. Prasaja, yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan
8. Satya, yaitu sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan ke samping
9. Gemi Nastiti, yaitu kesederhanaan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan
10. Belaka, yaitu kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk berani bertanggung jawab
11. Legawa, yaitu kemauan, kerelaan dan ketulusan untuk pada saatnya menjerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.⁷⁶

Oleh karena itu kemba li pada kunci permasalahan bahwa manusialah yang menentukan policy maka segala macam bentuk yang merupakan prasyarat penunjang akan tergantung, pada mannsia pelaksananya. Sebagai seorang pemimpin, dalam jiwanya harus tertanam doktrin/ideologi yang kuat bahkan sampai dikatakan menda rah daging. Dengan demikian dalam segala tindakannya akan mencerminkan sikapnya. Di samping itu mereka harus dapat mewariskan nilai-nilai seperti dalam Dharma Pusaka 45 kepada generasi muda sesuai dengan azas legawa dalam kepemimpinan.⁷⁷ Untuk menunjang usaha

⁷⁶Dephankam Akabri Udarat, (terbatas), Diktat Dharma Pusaka 45, 1976, hal. 10 Cf., Doktrin Perjuangan TNI-AD "Trm Ubaya Cakti", 1966, hal. 50-52

⁷⁷Ibid.

tersebut Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memberi bekal berupa teori dan dasar kepemimpinan serta praktek pemecahan persoalan. Dengan demikian maka pola latihan kepemimpinan berdasarkan mulai dari pengenalan syarat-syarat kepemimpinan yang diperluas dengan pengajaran dan pengembangan yang masing-masing menitik beratkan pada ilmu kepemimpinan militer maupun psikologi militer kemudian kepribadian yang dipadukan dalam latihan seni memimpin.⁷⁸

⁷⁸ Dephankam Akabri Udarat (terbatas), No. Code 23-302 Diktat Kepemimpinan Militer, 1969, hal. lamp.

BAB V
PENUTUP

Pembangunan dalam tubuh TNI-AD baik dalam bentuk fisik maupun non fisik terus mengalami kemajuan. Begitu juga dengan upaya yang dilakukan untuk membentuk para perwira jabatan TNI-AD di Akademi Militer Magelang dari tahun 1957-1979, selalu mengarah pada penyempurnaan. Untuk dapat mengetahui usaha dan hasil yang diperoleh dari sejarah Akademi Militer, bahkan juga proses pembaharuan pendidikan atau pembentukan perwira seperti tersebut di atas, maka penulis mencobanya untuk dapat menarik benang merah walaupun secara global untuk mewakili suatu kesimpulan:

1. Perkembangan Akademi Militer Magelang dilihat dari sejarahnya berawal dari Akademi Militer Yogya yang didirikan pada tahun 1945, yang waktu itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perwira (sebagai pemimpin pasukan) yang sangat mendesak. Hal demikian dapat dicermati dari proses penutupan Akmil Yogya sampai pada pembukaan Akademi Militer Nasional dengan segala konsekuensinya. Kecuali itu secara kelembagaan Akademi Militer Magelang dari tahun ke tahun selalu diperbaharui. Tahun 1961 ketika terdapat dua macam lembaga pendidikan perwira TNI-AD antara Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) di Bandung dan Akademi Militer Nasional di Magelang, maka kedua Akademi tersebut diintegrasikan dengan pendidikan dasar mereka di AMN (hal. 31-35).

Kemudian, setelah terjadi ~~divergensi~~ antar-Angkatan dan Polri serta dengan adanya peristiwa G 30 S/ PKI, maka AMN bersama dengan ketiga Akademi lainnya berubah bentuk menjadi Akabri dengan segalaanya sampai dengan tahun 1979 yang akhirnya berubah lagi menjadi Akabri Bagian Darat, dan tahun 1984 menjadi Akademi Militer (Akmil) sampai sekarang.

2. Akademi Militer Nasional yang merupakan wadah untuk membentuk calon parwira mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan kader-kader perwira melalui pendidikan dan latihan. Kader tersebut dipersiapkan untuk menjadi pemimpin walaupun tidak secara langsung, sebab perlu dipersiapkan lama sebelumnya serta harus pula dikehendaki oleh masyarakatnya . Memang kader tersebut akan memimpin dalam lingkungan TNI-AD, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kepemimpinan pemerintahannyapun, agaknya akan banyak dipegang para perwira generasi '45 atau 'generasi Magelang'. Oleh karena kader yang diperlukan menuntut persyaratan cukup berat, maka dalam perekrutan taruna diprioritaskan dari para pemuda yang memiliki konstelasi jasmani dan rohani untuk dapat mengemban tugas negara sebagai perwira (perekrutan taruna lih. hal. 52-58). Dalam arahnya untuk membentuk kader pemimpin, AMN menamakan pada para taruna materi yang menunjang baik pengetahuan umum, militer serta kemasyarakatannya. Hal demikian dimaksudkan agar kelak dapat dipero-



leh hasil yang sesuai harapan yaitu supaya dapat memimpin diri sendiri dan masyarakatnya.

3. Dalam kepemimpinan militer, perwira merupakan ujung tombak dalam menentukan policy, sehingga kekuatan dalam korps perwira harus selalu dibina. Seperti yang terjadi dalam pendidikan perwira TNI dari masing-masing Angkatan dan Polri merasa penting untuk membina keutuhan persatuan perwira di dalam Akabri. Akabri yang didirikan tahun 1966 dimaksudkan untuk membina keutuhan korps melalui pendidikan calon perwira. Pembinaan itu dilakukan dengan menyatukan para taruna dalam pendidikan dasar 'Chandradimuka' di Akabri Umum dan Darat (Udarat) Magelang. Setelah itu baru kemudian mereka melanjutkan mendalami materi pembentukannya sesuai dengan matryanya di akademi masing-masing. Tidak berhenti di situ saja, pembinaan integrasi juga dilakukan setelah mereka melanjutkan pendidikan seperti perlombaan atletik, latsitarda serta dalam pra-setya perwira. Namun demikian kesemuanya itu dilakukan untuk suatu tujuan utama yaitu mendapatkan unite de doktrin dalam memanggul beban sebagai alat pertahanan keamanan.
4. Pembentukan perwira TNI-AD di Akmil Magelang, khususnya dalam pembinaan doktrin mendapat tekanan cukup besar terlebih setelah disatukannya dalam Akabri. Hal itu terjadi karena indoktrinasi merupakan

sarana yang paling tepat untuk 'mendarahdagingkan' suatu nilai terutama nilai juang, dalam diri taruna yang akan menjadi perwira. Doktrin memang perlu ditanamkan menilik dari suatu peristiwa yang mempengaruhinya dan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi pewarisannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani
t.t. Tugas dan Amal Angkatan Darat dalam Revolusi Indonesia (Ceramah J.M. Pangad Letjen. A. Yani di hadapan kader revolusi). Puspen AD.
- Alfian
1978 Pemikiran dan Perubahan Politik di .. Indonesia
Jakarta: PT Gramedia
- Ali, R. Moh.
1965 Sedjarah dalam Revolusi dan Revolusi dalam Sedjarah.. Djakarta: Bhratara.
- Akabri (Rahasia)
1977 Buku II Latihan Integrasi Taruna Wreda "Bhakti Yudha".
- 1967 Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1984 Praspa ABRI 1984. Jakarta.
- Arsip
t.t. Sejarah Akmil. Bagsemtak Akmil Magelang.
- Dephankam (terbatas)
1971 Pola Dasar Pembinaan Mental ABRI Pinaka Baladima. SK. Menhankam/Pangab No. SKEP/B/562/VII/V971 tanggal 26 Juli 1971.
- Dephankam Akabri Udarat (terbatas)
1968 Realisasi Pembangunan Hankamnas dan Kekerjaan ABRI. Staf Hankam.
- Dephankam Akabri Udarat (terbatas)
1969 Diktat Kepemimpinan Militer.
- Dephankam Akabri Udarat (terbatas)
1980 Diktat Route Gerilya Pangsar Soedirman.
- Dephankam Akabri
1973 Akabri Membentuk Calon Perwira, Patriot, Pejuang: Tanggon, Tanggap, Trengginas.
- Dephankam Mabes TNI-AD (terbatas)
1973 Buku Petunjuk Sistim Pendidikan TNI-AD. Kep. KASAD No. KEP. 21/XII/1973 tanggal 18 Desember 1973.
- Dept. Administrasi (terbatas)
1969 Diktat Management Militer. SK. Gubernur Akabri Udarat No. KEP-46/4/1969.

- Dokumen Atekad
1960 Menjambut Pembukaan Akademi Teknik Angkatan Darat.
- Dydo, Todiruan
1990 Pergolakan Politik Tentara: Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Janowitz, Morris, terj.
1985 Hubungan-hubungan Sipil-Militer. Oleh: Sahat Simamora. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Kementrian Penerangan
t.t. Akademi Militer Nasional.
- Mabes AD Dit. Adjen.
1958 Buku Petundjuk Tjalon Tauna/Taruna Muda Akademi Militer Nasional.
- Moechkardi
1977 Akademi Militer Yogya dalam Revolusi Pisik 1945 1949. Jakarta: PT Inaltu.
- Moedjanto, G.
1988 Indonesia Abad ke-20: dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin, Yahya A.
1982 Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia. Yogya karta: Gadjah Mada University Press.
- Musin, Emilia
1967 Diendral Urip Sumohardjo Perintis Angkatan Bersenjata R.I. Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.
- Nasution, A.H.
t.t. 17 Oktober 1952 dalam Mencari Posisi TNI dalam Kehidupan Bernegara.
- Nasution, A.H.
1974 1 Oktober 1965 Kebangkitan 1966 Koreksi/ Pembauran/Pembangunan. Jakarta:
- Nordlinger, Eric A.
1990 Militer dalam Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penerangan Angkatan Darat
t.t. Aku ke A M N.
- Pusat Sejarah Tradisi ABRI
1985 40 Tahun ABRI I: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal dan Masa Integrasi 1945 - 1965. Jakarta.
- Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI
1985 40 Tahun ABRI II: 1965-1985. Jakarta.
- Rangka Pokok Pengajaran Akabri Udarat. SK. No. SKEP/D/2X/
1976 1976 tanggal 15 Pebruari 1976 hal/lamp. A.
- Santosa, Slamet
1980 Pembinaan Mental Tugas Utama Pendidikan. Jakarta: Sinar Harapan.

- Sawab Bero Sudirjo Bawon, "33 Tahun Akmil Magelang". Kedaulatan Rakyat, 12 Nopember 1990.
- SK. Menhankam/Pangab No. Skep/1383/X/1977 tanggal 24 Oktober 1977.
- Sianipar, Madiri Thamrin (peny.)
1984 Pendidikan Politik Bangsa. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sundhaussen, Ulf (terj.)
1986 Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Oleh Hassan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Surono, Purn., "Perjalanan Sejarah Bangsa Mempunyai Tantangan Sendiri", Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 1990.
- Suryohadiprojo, Sayidiman
1986 Langkah-langkah Perjuangan Kita. Jakarta: UI Press.
- Syahid, Bakri
1976 Pertahanan Keamanan Nasional. Yogyakarta: Bagus Arafah.
- Wibisono, Christianto "1991: Indonesia Garuda Ketiga". Suara Merdeka, 2 Januari 1991.
- Zamsuddin, Nazaruddin
1989 Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

oo00 SBSB 00oo

